

**ANALISIS FIQIH SIYASAH MENGENAI
NEGARA HUKUM PANCASILA**



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah dan
Hukum
UIN Raden Intan Lampung**

Oleh

**Dea Fanny Utari
NPM: 1321020146**

Jurusan : Siyasah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1439/2017M**

**ANALISIS FIQIH SIYASAH MENGENAI
NEGARA HUKUM PANCASILA**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Raden Intan Lampung**

Oleh

**Dea Fanny Utari
NPM: 1321020146**

Jurusan : Siyasah

**Pembimbing I : Dr. Hj. Erina Pane S.H., M.Hum
Pembimbing II : Drs. Henry Iwansyah, M.A.**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1439/2017M**

ABSTRAK

ANALISIS FIQIH SIYASAH MENGENAI NEGARA HUKUM PANCASILA

Oleh:
Dea Fanny Utari

Hakikat konstitusi sangatlah penting karena merupakan dokumen formal. Walaupun dalam Al-Quran tidak ada ayat yang secara eksplisit memerintahkan atau mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara, bahkan istilah *daulah* (negara) tidak pernah disinggung dalam Al-Quran, akan tetapi unsur-unsur dasar dalam masyarakat berbangsa dan bernegara dapat ditemukan didalamnya. Fiqih Siyasah sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara yang berkaitan dengan bagaimana hubungan manusia dengan Allah Swt sebagai penguasa hakiki dan mutlak terhadap dunia, mengatur hubungan antar sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam. Dalam hal ini Islam memandang negara tidak hanya berkaitan dengan dunia saja, tujuan pembentukan negara dalam membentuk hukum bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana konsep negara hukum Pancasila ? (2) Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap negara hukum Pancasila?. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari beberapa peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan pokok permasalahan serta referensi terkait dengan pokok permasalahan serta buku terkait yang kemudian dijadikan bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum skunder diperoleh dari membaca dan mempelajari literatur yang berupa buku atau karya ilmiah untuk mencari konsep-konsep atau teori-teori dan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk tulisan. Adapun analisa data

menggunakan metode dekriptif analitik dengan kerangka berfikir induktif.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini bahwa konsep negara hukum Pancasila itu memiliki unsur-unsur atau prinsip bernegara antara lain: Adanya supremasi hukum adanya pemerintah berdasarkan hukum, adanya pemerintahan berdasarkan hukum, Demokrasi, Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, Kekuasaan hakim yang bebas tanpa intervensi , adanya sarana kontrol hukum bagi tindakan-tindakan pemerintah, Hukum bertujuan untuk mensejahterakan dan keadilan sosial warga masyarakat, Berdasarkan asas ketuhanan yang maha Esa. Bahwa apabila ditinjau dari kedudukan Negara Hukum Pancasila berdasarkan prinsip-prinsip bernegara dalam Fiqih Siyasah, maka konsep pemerintahan Indonesia adalah sah dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunah.

Terdapat kesamaan antara prinsip-prinsip bernegara yang terdapat dalam negara hukum Pancasila dengan negara hukum menurut Fiqih Siyasah yakni: Prinsip supremasi dalam negara hukum Pancasila memiliki persamaan dengan prinsip persamaan dalam prinsip negara hukum menurut Fiqih siyasah, Prinsip pemerintahan berdasarkan hukum sesuai dengan prinsip keadilan, Prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi) ini juga sesuai dengan prinsip musyawarah, Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM dalam negara hukum Indonesia juga sesuai dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM dalam konsep negara hukum menurut fiqih siyasah.

Prinsip peradilan bebas tanpa intervensi dalam negara hukum Pancasila sesuai dengan prinsip peradilan bebas yang terdapat dalam negara hukum menurut fiqih siyasah, Adanya sarana kontrol hukum bagi tindakan-tindakan pemerintah sesuai dengan prinsip keadilan, perdamaian dan prinsip kesejahteraan, Hukum bertujuan untuk mensejahterakan dan keadilan sosial warga masyarakat, prinsip ini sesuai dengan prinsip kesejahteraan dan prinsip keadilan, Sila pertama “Ketuhanan yang maha Esa” dapat dipahami identik dengan tauhid yang merupakan inti dari ajaran Islam. Dalam ajaran Islam diberikan toleransi, kebebasan dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi

pemeluk ajaran agama mereka masing-masing. Pembagian negara menurut Ibnu Kaldun maka Indonesia tergolong kedalam jenis negara yang pemerintahan yang berdasarkan nalar (*siyasaḥ aqliyah*), Sedangkan pembagian negara menurut Al-Farabi maka Indonesia memiliki persamaan dengan negara bahagia (*al-madinah al-fadilah*).





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030

PERSETUJUAN

Nama : **Dea Fanny Utari**
NPM : **1321020146**
Program Studi : **Siyasah**
Fakultas : **SyariahdanHukum**
Judul Skripsi : **ANALISIS FIQIH SIYASAH MENGENAI
NEGARA HUKUM PANCASILA**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam siang
Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Erina Pane S.H., M.Hum
NIP.197005022000032001

Drs. Henry Iwansyah, M.A.
NIP.19581207198703002

Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasah

Drs. Susiadi AS., M.Sos.I
NIP195808171993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **ANALISIS FIQIH SIYASAH MENGENAI
NEGARA HUKUM PANCASILA** disusun oleh : **Dea Fanny Utari,
NPM, 1321020146**, Program Studi : **Siyasah**, telah diujikan dalam
Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan
Lampung, pada hari/tanggal: Rabu, 04 Oktober 2017.

TIM PENGUJI

Ketua : Frenki, M.Si

Sekretaris : Hendriyadi, SHI.,MH.

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag.MH.

Penguji II : Dr.Hj. Erina Pane, S.H.,M.Hum.



**Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag.
NIP.197009011997031002**

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:.. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publisher, 2007), h. 72.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Sri Rahayu dan Mustofa sebagai Ibu dan bapakku tercinta yang selama ini sudah mendidik, membimbing dan mendo'akan ku disetiap langkah dan mengajarkan ku dari sedari kecil hingga beranjak dewasa saat ini, untuk selalu menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.
2. Adik perempuanku yang bernama Dwi Anggraeni
3. Guru, kakak, sekaligus sahabat terbaikku yang bernama Doni Hakiki (Alm) yang selalu mengajari dan mendidik ku dengan keras, yang selalu memberi semangat disaat titik terendah ku
4. Sahabat karibku yang bernama Ines Haswinda Siwi Saputri yang selalu menemani dalam suka maupun duka
5. Special Friends yang selalu menemaniku dalam penggarapan skripsi yang bernama Amanda Rahmat Hidayat
6. Ayah Hatanis BA dan Umik Rumiya S.Pd sebagai ibu dan ayah angkat ku selama menempuh pendidikan SI di UIN Raden Intan Bandar Lampung
7. Almamaterku Iain Raden Intan Lampung
8. Sahabat-sahabatku yang selalu memberi semangat dan tidak lelah mengarahkanku dalam segala hal dan dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai. Yang tidak bisa aku sampaikan semua, Terimakasih kepada Inayatul Milati atas saran dan pendapatnya yang membantu ku dalam penggarapan skripsi, Bakti Setyo Arti, Diah Kusuma Ningrum.
9. Terimakasih kepada, pak Henry Iwansyah (Pembimbing Akademik I), bu Erina Pane (Pembimbing Akademik II), Pak Alamsyah (Dekan Syariah), pak Khoiruddin (Wadek Syariah), pak Alamsyah (Dekan) maupun para Dosen-dosenku yang senantiasa membimbing, mengarahkan dan mencurahkan ilmunya untuk masa depanku, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

RIWAYAT HIDUP

Dea Fanny Utari, lahir pada tanggal 18 November 1995 di Kota Metro Provinsi Lampung. Anak pertama dari dua bersaudara, merupakan buah cinta kasih dari pasangan Bapak Mustofahdan Ibu Sri Rahayu. Adapun riwayat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. TK Makarti Muktitama Dwi Warga Tunggal Jaya (Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang) lulus tahun 2001
2. SDN 01 Tunggal Warga (Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang) lulus tahun 2007
3. SMP Negeri 06 Banjar Agung (Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang) lulus tahun 2010
4. SMK HMPTI Banjar Agung (Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang) lulus tahun 2013
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah Jurusan dari tahun 2013 hingga saat ini.



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Berkat kemuliaan-Nya, penulis akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Analisis Fiqih Siyasah Mengenai Negara Hukum Pancasila”. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad S.A.W. Berkat perjuangan, pengorbanan dan keberaniannya kita dapat bernafas dalam atmosfer Islam yang penuh kedamaian.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata satu (S1) jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Raden Intan Bandar Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Skripsi ini tidak akan selesai tepat waktu apabila tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun secara tidak langsung karena itu penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung yang selalu tanggap kesulitan mahasiswa
2. Dr. Khairuddin, MH, selaku Wadep Syariah
3. Dr. Hj. Erina Pane, S.M., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik I dan Drs. Henry Iwansyah, M.A. selaku Pembimbing Akademik II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis sehingga skripsi ini selesai.
4. Bapak dan ibu dosen civitas akademika Fakultas Syariah UIN Raden Intan Bandar Lampung.
5. Bapak dan ibu staf karyawan perpustakaan Fakultas Syariah, perpustakaan pusat IAIN Raden Intan Lampung dan perpustakaan Daerah Bandar Lampung.
6. Untuk bapak, ibu, adik, sampai Doni hakiki, mba ines, Amanda, terimakasih atas dukungan dan doa nya selama

ini serta bantuan yang tak terkira baik yang bersifat materi maupun non materi.

7. Untuk sahabat-sahabat terbaikku Siyasah B angkatan 2013
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, waktu dan dana yang dimiliki. Akhirnya niat tulus dan ikhlas dan kerendahan ahti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau penelitian berikutnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu siyasah.

Bandar Lampung, 04 Oktober 2017

Penulis

Dea Fanny Utari
NPM.1321020146



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Penjelasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Penelitian.....	9
G. Metodologi Penelitian	10
BAB II NEGARA HUKUM MENURUT FIKIH SIYASAH	
A. Asal Mula Terbentuknya Negara	15
B. Macam-Macam Negara Hukum	18
C. Tujuan Berdirinya Negara	24
D. Prinsip-Prinsip Bernegara Menurut Fiqih Siyasah	25
BAB III NEGARA HUKUM PANCASILA	
A. Pengertian Negara Hukum Pancasila.....	45
B. Dasar Hukum Pancasila Sebagai Dasar Negara.....	58
C. Unsur-Unsur Negara Hukum Pancasila.....	63
BAB IV KONSEP NEGARA HUKUM PANCASILA DITINJAU DARI PRINSIP-PRINSIP BERNEGARA DALAM FIKIH SIYASAH	
A. Negara Hukum Menurut Pancasila	69

B. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Negara Hukum Pancasila	74
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	

H. Penjelasan Judul	1
I. Alasan Memilih Judul	3
J. Latar Belakang Masalah.....	3
K. Rumusan Masalah	9
L. Tujuan Penelitian.....	9
M. Kegunaan Penelitian.....	9
N. Metodologi Penelitian	10

BAB II NEGARA HUKUM MENURUT FIQIH SIYASAH

E. Asal Mula Terbentuknya Negara	15
F. Macam-Macam Negara Hukum	18
G. Tujuan Berdirinya Negara	24
H. Prinsip-Prinsip Bernegara Menurut Fiqih Siyasah	25

BAB III NEGARA HUKUM PANCASILA

- D. Pengertian Negara Hukum Pancasila..... 45
- E. Dasar Hukum Pancasila Sebagai Dasar
Negara 58
- F. Unsur-Unsur Negara Hukum Pancasila 63

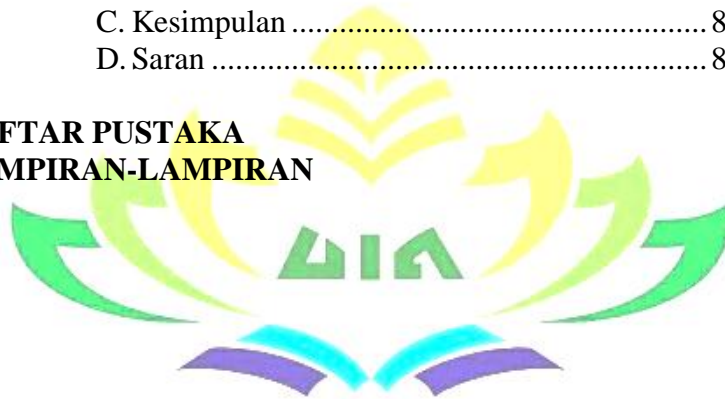
BAB IV KONSEP NEGARA HUKUM PANCASILA DITINJAU DARI PRINSIP-PRINSIP BERNEGARA DALAM FIQIH SIYASAH

- C. Negara Hukum Menurut Pancasila 69
- D. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Negara
Hukum Pancasila 74

BAB V PENUTUP

- C. Kesimpulan 89
- D. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN





BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Rencana penelitian pustaka ini yaitu mengenai **Analisis Fiqih Siyasah Mengenai Negara Hukum Pancasila**”, untuk memahami kesalahan dalam memahami dan menafsirkan judul tersebut, maka istilah yang terkandung dalam judul ini perlu dijelaskan.

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) dan sebagainya untuk mengetahui yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya).²
2. Fiqih Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.³ Fiqih siyasah merupakan ilmu yang membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaku kekuasaan, apa dasar kekuasaan, dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan, serta bagaimana menjalankan kekuasaan, dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya. Pengertian Fiqih juga ditemukan dalam sabda Rasulullah Saw, yang berbunyi⁴:

أَلْعِلْمُ الَّذِي يَبَيِّنُ أَلْأَحْكَامَ لَشَرِّ عِيَّةٍ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِأَفْعَالِ
لِ الْمَكْلُوفِينَ أَلْمُسْتَنْبَطَةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةُ

Artinya: ilmu yang menerangkan segala hukum agama yang berhubungan dengan pekerjaan para mukallaf yang dikeluarkan (di-istinbath-kan) dari dalil-dalil yang jelas (tafshili)

² Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*PN (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 39.

³ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualitasasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranadamedia, 2014), h.4.

⁴ Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 63.

Dasar yang paling utama bagi negara menurut Fiqih Siyasah adalah bahwa alhakimiyah kekuasaan legislatif dan kedaulatan hukum tertinggi berada di tangan Allah SWT sendiri, dan bahwa pemerintahan kaum mukminin pada dasarnya dan pada hakikaitnya adalah khalifah atau perwakilan, dan bukannya pemerintahan yang lepas kendalinya dalam segala yang diperbuat, tetapi harus bertindak di bawah undang-undang ilahi yang bersumber dan diambil dari kitab Allah dan Sunah Rasulnya.

3. Negara Hukum adalah suatu organisasi yang berpemerintahan dan berdaulat di wilayah tertentu yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi.⁵
4. Negara Hukum Pancasila adalah segala aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia.⁶ Dalam hal menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus didasari oleh Pancasila untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan pengertian dari istilah-istilah diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini yaitu bagaimana pandangan fiqih siyasah terhadap konsep Negara Hukum Pancasila apabila dilihat dari prinsip-prinsip bernegara dan unsur-unsur yang terkandung didalamnya.

⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Adi Mahasatya, 2007), h. 207.

⁶ Yopi Gunawan & Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h.94.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-alasan yang mendorong dipilihnya judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Konsep negara hukum ^{sangat} dipengaruhi oleh negara yang menerapkannya, sehingga konsep negara hukum yang ada di Indonesia berbedaan dengan konsep hukum yang dianut di negara lain. Karena memiliki ciri khas yaitu peraturan yang dibuat sesuai dengan nilai-nilai dasar di Indonesia yaitu Pancasila. Negara Indonesia mengakui adanya Tuhan, tetapi Indonesia tidak bisa dikatakan sebagai negara yang menganut agama tertentu. Hal ini sesuai dengan Pancasila sila yang pertama.

2. Alasan Subjektif

- a). Bahasan ini belum pernah dibahas khususnya dalam bentuk skripsi dan penulis merasa mampu dikarenakan banyak sumber yang tersedia.
- b). Kajian ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni.

C. Latar Belakang

Manusia sebagai individu tidak mampu hidup sendiri, dalam menjalani kehidupannya akan senantiasa bersama dan bergantung pada manusia lainnya. Manusia saling membutuhkan dan harus bersosialisasi dengan manusia lain. Aristoteles (384-322 SM) seorang ahli filsafat Yunani Kuno menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia adalah *Zoon Politicon* yang artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk, pada dasarnya selalu ingin bergaul dalam masyarakat.⁷ Kehidupan yang senantiasa bersama dan saling bergantung ini yang kemudian membentuk entitas masyarakat untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan yang tergabung dalam sebuah negara.

⁷ Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar cetakan Keenam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 44.

Hubungan interaksi didalam masyarakat ada yang bersifat positif dan ada juga yang negatif. Interaksi positif menimbulkan hal yang positif juga bagi masyarakat sekitarnya, sedangkan interaksi negatif menimbulkan kerusakan yang berimbas pada masyarakat juga. Maka dalam hal ini kebutuhan akan adanya negara (Konstitusi) dalam mengatur kehidupan manusia sangatlah urgen. Fungsi negara untuk mengatur kehidupan manusia ini berbentuk suatu peraturan atau hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, disamping berfungsi sebagai pengatur, hukum ini juga sebagai alat untuk memaksa, untuk membatasi perilaku masyarakatnya dan dapat memberikan sanksi terhadap pelanggarnya. Hukum (Konstitusi) ini juga harus bersifat *flexibel* dengan perkembangan zaman.

Hakikat sebuah konstitusi sangatlah penting karena merupakan dokumen formal. Menurut Andrews, konstitusi pada umumnya, harus memenuhi unsur kesepakatan tentang cita-cita bersama dari filsafat negara, kesepakatan hukum sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara, dan juga harus berisi kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan.⁸

Fiqih siyasah sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri terlepas dari masa pemerintahan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun di dalam Al-Qur'an tidak ada satu dalil pun yang secara eksplisit memerintah atau mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara. Lebih dari itu bahkan istilah negara (*Daulah*) pun tidak pernah disinggung dalam Al-Qur'an, tetapi, unsur-unsur dasar dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, dapat ditemukan didalamnya. Beberapa prinsip pokoknya antara lain: musyawarah, Keadilan, Persamaan.⁹

⁸Harjono, *Legitimasi Perubahan Konstitusi Kajian Terhadap UUD 1945*(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009), h. 35.

⁹Mujar Ibnu Syarif, *Hak-Hak Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam* (Bandung: Angkasa Bandung,2003), h. 11.

Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang dalam konstitusional meletakkan “musyawarah” sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok diatas prinsip-prinsip umum dan dasar yang baku yang telah ditetapkan oleh nash-nash Al-Quran dan hadis nabawi¹⁰. Solusi untuk mendapatkan keadilan dalam Islam yakni dengan bermusyawarah, bahwa dalam bermusyawarah Islam memberikan batasan-batasan yakni tidak boleh melampaui kepada apa yang telah ada nash-nya secara pasti dan jelas, maka dalam hal ini larangan untuk berijtihad disana, kecuali ijtihad untuk memahami atau dalam rangka menerapkannya hal ini sesuai dengan Q.S Al-Imran ayat 159.

بِمَا نَفَضُوا الْقُلُوبَ غَلِيظًا كُنْتَ وَلَوْ لَهُمْ لَنْتَ اللَّهُ مِنْ رَحْمَةٍ فِيمَا
عَزَمْتَ فَإِذَا الْأَمْرُ فِي وَشَاوَرَهُمْ هُمْ وَأَسْتَغْفِرَ عَنْهُمْ فَأَعْفُ حَوْلَكَ
﴿الْمُتَوَكِّلِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ فَتَوَكَّلْ﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.¹¹

Konsep keadilan dalam Islam, yakni berupa menyapaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dalam menetapkan hukum maka harus dengan seadil-adilnya,

¹⁰ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2005), h. 35.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publisher, 2007), h.90.

memberikan hak kepada yang berhak hal ini sesuai dengan Q.S. An-Nisa ayat 58. Konsep persamaan dalam Islam menyatakan bahwa tidak ada perbedaan seseorang baik non-Muslim dan Muslim dalam Negara Islam, mereka sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama, yang berbeda hanyalah iman dan taqwanya kepada Allah SWT hal ini sesuai dengan Q.S. Al-Hujarat ayat 13.

Prinsip-prinsip bernegara diatas sebagai umat Islam, menurut penulis adapun pendoman dalam menjalankan kehidupan terkait dengan masalah dunia yakni Qs. Al-Israa 9

لُمُونَ الَّذِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرُ أَقْوَمَهُمُ هِيَ لِلَّتِي يَهْدِي الْقُرْآنَ هَذَا إِنَّ
كَبِيرًا أَجْرَهُمْ أَنَّ الصَّلَاحَ تَعَمُّ

Artinya: *Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.*¹²

Pentingnya hukum dalam kehidupan bernegara dalam rangka mengelola dan mengatur seluruh kehidupan bermasyarakat. Tanpa adanya hukum manusia akan berantakan, tidak terarah, kejahatan didunia akan merajalela. Maka pentingnya hukum dalam hal ini sangatlah urgen, baik dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan beragama. Dalam hal ini Islam memandang negara tidak hanya berkaitan dengan kepentingan dunia saja, tujuan pembentukan negara dalam membentuk hukum bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta¹³.

Islam bertujuan untuk memelihara, agama,akal, keturunan dan harta saling berkaitan, yang dimaksud

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publisher, 2007), h 385.

¹³ Muhammad Rusli, *Ushul Fiqih I* (Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2017), h. 14.

memelihara Agama seperti perintah mengerjakan sholat, puasa dan lain-lain. Memelihara jiwa yakni seperti hukuman bagi para pembunuh. Memelihara akal artinya larangan meminum minuman keras, narkoba dan sejenisnya karena dapat merusak akal fikiran manusia. Memelihara keturunan seperti larangan berzinah dan hukumannya. Memelihara harta yaitu dengan hukuman potong tangan atau kaki bagi para pencuri (dengan syarat dan ketentuan tertentu). semua itu saling berkaitan yang tujuan utamanya terdapat pada Q.S Al-An'am :162

﴿الْعَالَمِينَ رَبِّ اللَّهِ وَمِمَّا قِيَّ وَنُحْيَا وَيُكْفِي صَلَاتِي إِنَّ

Artinya: *sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.*¹⁴

Islam memaknai kehidupan didunia saling berkaitan antara hubungan manusia dengan sang maha pencipta (Allah SWT) dan hubungannya dengan manusia dalam bermasyarakat dalam melaksanakan tugas amar makrur nahi munngkar. Di kalangan pemikir sunni berpandangan bahwa pembentukan negara merupakan kewajiban. Menurut Al-Mawardi, imamah (Negara) dibentuk dalam rangka menggantikan posisi kenabian (*nubuwwah*) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia¹⁵.

Negara Indonesia sebagai negara hukum (*Richtsidee*) Pancasila memberikan landasan bagi tujuan hukum yaitu meberikan pengayoman kepada manusia yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakat berlangsung secara wajar sehingga secara adil setiap manusia akan memperoleh

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publisher, 2007), h.201.

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Op.Cit.* h.122.

kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh¹⁶.

Pewujudan persamaan hak dan kewajiban di depan hukum di Indonesia merupakan cita hukum (*rechtsidee*) dalam mewujudkan keadilan di satu pihak dan dilain pihak sebagai sistem norma hukum. Persamaan yang dimaksud dalam UUD 1945, dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (1) sebagai berikut:

“ segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan didepan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal-pasal ini mengenai hak warga negara, baik hanya mengenai warga negara maupun mengenai seluruh penduduk, memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun negara yang demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan kemanusiaan.¹⁷

Menurut penulis membentuk negara dipandang sangatlah urgen sebagai pengatur, sebagai alat untuk memaksa, untuk membatasi perilaku masyarakatnya, tanpa adanya negara manusia akan berantakan, tidak terarah, kejahatan didunia akan merajalela. Negara dengan dukungan hukum yang adil dapat menciptakan suasana masyarakat yang sejahtera, aman dan kehidupan antara umat beragama akan rukun. Baik konsep negara hukum Pancasila dan negara hukum menurut Fiqih Siyash dan konsep negara hukum lainnya sama-sama bertujuan untuk itu, tidak ada satupun konsep negara dengan tujuan yang tidak baik. Semua pembentukan negara dengan konsep negara hukumnya bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Hanya saja setiap konsep negara hukum dimasing-masing negara memiliki ciri khas, sesuai dengan kebatianan, cita-cita dan ciri khas dari negara yang bersangkutan.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, penulis mengambil rumusan masalah dalam pembahasan skripsi ini adalah :

¹⁶Yopi Gunawan dan Kristian, *Op. Cit*, h .7.

¹⁷ Zainudin Ali, *Sosialogi Hukum cet. Keempat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 101.

1. Bagaimana konsep negara hukum Pancasila ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap negara hukum Pancasila?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
 - a) Memberikan kemudahan bagi para pembaca khususnya penulis untuk mengetahui konsep negara hukum, khususnya konsep Negara Pancasila dan Analisis Fiqh Siyasah Mengenai negara hukum Pancasila.
 - b) Untuk memperluas wawasan tentang hukum dalam bidang hukum Tata Negara Islam khususnya yang berhubungan dengan negara Hukum Pancasila dan analisis Fiqh Siyasah terhadap negara hukum Pancasila.
2. Tujuan Subjektif
 - a) Bahan ini belum pernah dibahas khususnya dalam bentuk skripsi dan penulis merasa mampu dikarenakan banyak sumber yang tersedia
 - b) Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Sarjanah (S1) Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara Islam) pada UIN Raden Intan Bandar Lampung.
 - c) Kajian ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai negara hukum Pancasila dan negara hukum menurut fiqh siyasah
 - b. Dapat membawa perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai rujukan

tentang konsep negara hukum Pancasila dan konsep negara hukum menurut fiqh siyasah.\

- c. Untuk menambah referensi, bahan literature atau pustaka, khususnya dalam memahami konsep negara hukum Pancasila dan konsep negara hukum menurut fiqh siyasah.
 - d. Dapat dijadikan dasar kajian untuk penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam tentang permasalahan terkait.
2. Manfaat secara praktis
- a. Memberikan wawasan kepada penulis dan dalam rangka meningkatkan disiplin ilmu yang akan dikembangkan sesuai dengan bidang studi yang merupakan mata kuliah pokok dan diperdalam lebih lanjut lagi melalui studi-studi yang serupa dengan disiplin ilmu tersebut.
 - b. Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu kenegaraan di setiap perguruan tinggi di Fakultas Syariah dan ilmu hukum.
 - c. Memberikan sumbangsih khususnya dibidang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip yang terdapat dalam negara hukum Pancasila bertentangan atau tidak dengan prinsip bernegara dalam fiqh siyasah, serta adakah persamaan atau perbedaan antara konsep negara hukum Pancasila dengan konsep negara hukum fiqh siyasah.

G. Metode Penelitian

Penelitian digunakan untuk memecah suatu permasalahan, mengembangkan dan menguji kebenaran. Untuk memecahkan suatu permasalahan maka diperlukan suatu rencana yang sistematis. Supaya penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini memerlukan

metode tertentu. Supaya mendapatkan hasil yang maksimal maka peneliti menggunakan jenis penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a) Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Library Reseach (Penelitian Kepustakaan). Penelitian kepustakaan yaitu “penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan), baik berupa buku-buku catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu”¹⁸. Melalui metode ini penulis berusaha mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan jalan mencari pendapat-pendapat dan teori-teori yang relevan dengan pokok-pokok permasalahan yang terdapat di dalam skripsi ini untuk dijadikan sumber rujukan dalam usaha menyelesaikan penulisan.
- b) Sifat penelitian ini termasuk penelitian hukum *yuridis normatif*. Adapun bentuk penelitian *yuridis normatif* adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode *Deskriptif analitik* yaitu dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian memperoleh kesimpulan.¹⁹

2. Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis-jenis data dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa buku yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu buku karangan Muhammad Iqbal “Fiqh Siyasah” kontekstualitas doktrin politik Islam, dan menggunakan undang-undang maupun Al-Quran, buku karangan Muhammad Tahir Azhari

¹⁸ Susiadi AS, *Metode penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015), h.10.

¹⁹ Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Politik Hukum* (Citra Ditya Bakti, Bandung, 2004), h.126.

“Negara Hukum” Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Priode Madinah dan Masa Kini, buku karangan Munawir Sjadzali, “Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan pemikiran”, dan buku karangan Backy Krisnayuda, “Pancasila & Undang-Undang Realisis dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia”.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini berupa buku, online, karya tulis, jurnal, dan artikel-artikel yang dapat mendukung dalam penulisan ini.

b. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Karena peneilitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, maka sumber data diperoleh dengan menulusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian bersumber dari buku-buku yang mengkaji mengenai fiqih siyasah, undang-undang, maupun Al-Quran yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data bahan hukum, langkah pertama yang dikerjakan dalam penulisan skripsi ini adalah mencari beberapa peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan pokok permasalahan serta refrensi buku terkait yang kemudian dijakdikan bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari membaca dan mempelajari literatur yang berupa buku dan karya ilmiah untuk mencari konsep-konsep, teori, dan pendapat yang berkaitan erat dengan permasalahan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk tulisan.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber (*literatur*) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka selanjutnya adalah

pengumpulan data yang diperoses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Data (*Editing*) yaitu mengkoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup, lengkap, benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah.
2. Penandaan Data (*coding*) yaitu memeriksa catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (Buku-buku, pendapat para ahli baik dari para ahli hukum islam, Indonesia maupun para ahli hukum barat, Al- Qur`an dan Hadis, dan UUD 1945 dan refrensi lainnya).
3. Rekontruksi data (*recontrukting*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan di interprestasikan.
4. Sistematika Data (*sistematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.
5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh dengan menggunakan metode penelitin kepustakaan kemudian dianalisis dengan metode Induktif yaitu "cara berfikir dari fakta-fakta yang bersifat khusus, peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang konkrit tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum".²⁰

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Cetakan ke III* (Bandung:Bina Aksara,1990), h. 211.



BAB III

NEGARA HUKUM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

A. Asal Mula Terbentuknya Negara Hukum

Mengingat syariat tidak menyediakan aturan baku tentang sistem politik dan pemerintahan, maka umat Islam harus berusaha mengeluarkan nilai-nilai hukum yang terkandung dalam syariat sehingga dapat ditemukan rumusan yang paling mungkin untuk menerjemahkan nilai-nilai tersebut kedalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal membahas negara tidak ada satu definisi yang disepakati tentang negara. Namun, secara umum mungkin dapat dijadikan pegangan-sebagaimana lazim dikenal dalam hukum Internasional bahwa suatu negara biasanya memiliki tiga unsur pokok yakni (1) Adanya rakyat (2). Adanya wilayah (3). Adanya pemerintahan yang berdaulat. Pengertian negara bukan saja atas perjanjian bermasyarakat (kontrak sosial), tetapi juga atas dasar manusia sebagai khalifah Allah yang mengemban kekuasaan dan amanah-Nya.²¹

Manusia dalam menjalankan hidup ini harus sesuai dengan perintah-perintah-Nya dalam rangka mencapai kesejahteraan dunia maupun diakhirat. Dengan demikian, secara umum dapat diartikan bahwa manusia harus selalu memperhatikan dan melaksanakan *amar ma'ruf dan nahi munkar*, mengandung arti bahwa manusia harus melakukan kebaikan dan mencegah kerusakan. Adapun sarjana-sarjana yang mengungkapkan pikiran tentang asal mula negara antarlain sebagai berikut:

1. Ibnu Abi Rabi

Plato, Ibnu Abi Rabi' juga berpendapat bahwa manusia, orang-seseorang, tidak mungkin mencukupi kebutuhan alamnya sendiri tanpa bantuan orang lain dan oleh karenanya mereka saling memerlukan.²² Hal itu mendorong

²¹ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Priode Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Kencana, 2004), h.17.

²² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan pemikiran* (Jakarta: UI Press, 2011), h.43.

mereka saling membantu dan berkumpul serta menetap disuatu tempat, dari proses bantu dan berkumpul disuatu tempat itulah mulai tumbuhlah kota-kota.

Menurut Ibnu Abi Rabi' hal-hal inilah yang tidak mungkin ditinggalkan dalam kehidupan manusia dan untuk memenuhinya maka diperlukan bantuan dari pihak lain seperti pakaian untuk melindungi diri dari gangguan panas, udara dingin dan angin, mereka juga membutuhkan tempat tinggal yang aman terhadap berbagai macam bahaya, hal semacam ini dibutuhkan supaya mereka dapat mempertahankan kelangsungan dan eksistensi manusia di bumi ini.

Kegiatan tersebut tidak mungkin dipenuhi sendiri melainkan membutuhkan bantuan dari orang lain dan dibutuhkan pula berbagai keahlian, ilmu dan keterampilan banyak orang. Dalam hal kebutuhan kerjasama untuk mengadakan segala yang diperlukan bersama itu akan berakibat pembagian tugas di antara anggota-anggota masyarakat, dan lahirlah kelompok petani, tukang sepatu, tukang pandai besi, sesuai dengan kemampuan dan bakat masing-masing.

Disebabkan oleh jumlah penduduk yang semakin meningkat, kota dengan batas-batasnya menjadi sempit, juga wilayah pertanian dan wilayah gembala ternak memerlukan perluasaan, sehingga menimbulkan bentrokan-bentrokan kepentingan dengan kota lain. Maka dibutuhkan kelompok bersenjata yang dilatih untuk membela kepentingan kota itu terhadap kota-kota tetangga dan juga seorang kepala yang berwibawa dan mampu menyelesaikan sengketa antar warga-warga kota dan memimpin kotanya menghalau serangan dan ancaman dari luar.

2. Farabi

Plato, Aristoteles dan juga Ibnu Abi Rabi sebelumnya memiliki pandangan yang sama tentang manusia sebagai makhluk sosial, dalam hal ini juga Farabi berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat, karena tidak

mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain.²³ Dengan kecendrungan masyarakat yang saling membutuhkan itu timbulah berbagai kerjasama yang secara perlahan menjadi sebuah organisasi yang kokoh yang kita sebut dengan negara.

Farabi juga berpendapat bahwa tujuan bermasyarakat dan bernegara itu tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup, tetapi juga untuk menghasilkan kelengkapan hidup yang akan memberikan kepada manusia kebahagiaan, tidak hanya kebahagiaan material tetapi juga spiritual.

3. Mawardi

Plato, Aristoteles, dan Ibnu Abi Rabi', maupun Mawardi juga berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial, tetapi Mawardi memasukkan unsur agama dalam teorinya. Menurut Mawardi adalah Allah menciptakan manusia supaya tidak sanggup memenuhi kebutuhan sendiri, tanpa bantuan orang lain, agar manusia selalu sadar bahwa Dia-lah pencipta manusia dan pemberian rezeki, dan bahwa manusia membutuhkan Dia serta memerlukan pertolongan-Nya.²⁴

Mawardi kelemahan manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri dan terdapat keanekaragaman dan perbedaan bakat, pembawaan, kecendrungan alami serta kemampuan, semua itu mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu dan akhirnya sepakat untuk mendirikan sebuah negara. Menurut Mawardi sebab lahirnya negara adalah hajat umat manusia untuk mencukupi kebutuhan bersama, dan otak mereka yang mengajari tentang cara bagaimana saling membantu dan tentang bagaimana mengadakan ikatan satu sama lain.

²³*Ibid.* h.51.

²⁴*Ibid.* h.61.

4. Ghazali

Ilmuan-ilmuan politik sebelumnya, seperti ghazali juga berpendapat bahwa manusia itu makhluk sosial, ia tidak dapat hidup sendiri, yang disebabkan dua faktor yakni kebutuhan akan keturunan demi kelangsungan hidup manusia dan juga kebutuhan untuk saling membantu dalam penyediaan bahan makanan, pakaian dan pendidikan anak.²⁵ Dalam memenuhi segala sesuatu itu diperlukan kerjasama, sama halnya dalam hal ini negara merupakan unit terbesar yang terbentuk akibat kebutuhan manusia yang tidak bisa dipenuhi sendiri, kerjasama inilah yang kemudian melahirkan negara.

Dari empat pemikir Islam itu memiliki kesamaan satu samalain, tampak sekali adanya pemikiran Yunani, dengan diwarnai akidah Islam. Agak berbeda dengan pemikir-pemikir Yunani, Pemikir-pemikir Islam itu baik secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan bernegara tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan lahiriah manusia saja, tetapi juga kebutuhan rohaniah dan ukhrawiah.

B. Macam-Macam Negara Hukum

Penulis mengutip dua tokoh pemikiran politik Muslim pada zaman klasik yakni Ibnu Khaldun dan Farabi

1. Ibnu Khaldun (1332-1346)

Nama dan silsilah lengkap Ibn Kaldun adalah Abd Al-Rahman bin Muhammad bin Mohammad bin Hasan bin Jafar bin Mohammad bin Ibrahim bin Abd al-Rahman bin Kaldun, beliau lahir di Tunsia, Afrika Utara, pada tahun 732 H atau 1332 M dari keluarga pendatang dari Andalusia, Spanyol Selatan, yang pindah ke Tunisia pada pertengahan abad VII H. Ibnu Kaldun meniti karirnya dalam bidang pemerintahan dan politik dikawasan Afrika Barat Laut dan Andalusia selama hampir seperempat abad.²⁶

Dalam kurun waktu itu lebih dari sepuluh kali beliau berpindah jabatan dan seringkali bergeser loyalitas dari satu

²⁵*Ibid.* h.74.

²⁶*Ibid.* h.90.

dinasti kedinasti yang lain dan dari seorang penguasa ke penguasa lain dari dinasti yang sama. Ibnu Khaldun mempunyai corak tersendiri dalam hal menggolongkan negara. Ia membagi corak negara kedalam dua bagian yaitu negara dengan ciri kekuasaan alamiah *mul'k tabi'I* (negara tradisional) dan negara dengan ciri kekuasaan politik *mulk siyasi* (negara modern) yang dalam hal ini dibagi menjadi tiga yaitu *siyasah diniyah*, *siyasah aqliyah*, dan *siyasah madaiyah*.²⁷

- a) Negara dengan ciri kekuasaan alamiah (*mulk tabi'i*) atau negara Tradisional

Tipe negara alamiah ditandai oleh kekuasaan yang sewenang-wenang dan otoriter (despotisme) dan cenderung kepada "hukum rimba". Di sini keunggulan dan kekuatan sangat berperan. Hukum hanya dipakai untuk menjerat leher rakyat yang tertindas, sementara elit penguasa bebas melakukan dosa dan maksiat sesukanya dan prinsip keadilan diabaikan. Baik keadilan ekonomi maupun keadilan sosial-politik. Ia menyebut negara alamiah seperti ini sebagai negara yang tidak berperadaban (*uncivilized state*).

- b) Negara dengan ciri kekuasaan politik (*mulk siyasi*) atau negara modern.

Tipologi negara modern yang berdasarkan kekuasaan politik dibagi menjadi tiga macam yaitu

1. Negara hukum atau nomokrasi Islam (*siyasah diniyah*)

Siyasah diniyah adalah negara hukum dalam tipe yang pertama adalah suatu negara yang menjadikan Syari'ah (hukum Islam) sebagai fondasinya. Malcolm H. Kerr, sebagaimana dikutip oleh Thaher Azhary menamakannya dengan istilah Nomokrasi Islam (*Islamic Nomocracy*). Karakteristik *Siyasah Diniyah* atau Negara Hukum berdasarkan Islam menurut Ibnu Khaldun adalah

²⁷Herdi Sahrasad, "Negara, Islam dan Nasionalisme Sebuah Perspektif", *Al-Chaidar*, Vol.3 No.1 (April 2013), h.45.

negara yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, serta akal manusia yang turut juga berperan dan berfungsi dalam kehidupan negara. Akal manusia yang dimaksudkan adalah *ijma' ulama* dan *qiyas*. Sehingga Negara Nomokrasi Islam atau negara Islam adalah Negara Ulama

2. Negara hukum sekuler (*siyasah 'aqliyah*)

Siyasah aqliyah adalah negara yang hanya mendasarkan pada hukum sebagai hasil rasio manusia tanpa mengindahkan pada hukum yang bersumber dari wahyu, maka negara semacam ini dapat kita lihat pada negara-negara demokrasi Barat di Eropa maupun Amerika pada umumnya.

3. Negara “Republik” ala Plato (*siyasah madaniyah*)

Siyasah madaniyah adalah merupakan suatu negara yang diperintah oleh segelintir golongan elite atas sebagian besar golongan budak yang tidak mempunyai hak pilih

2. Farabi (870-950)

Nama lengkap Farabi adalah Abu Nashar bin Mohammad bin Mohammad bin Tharkhan bin Unzalagh. Sebagai ilmunan dia jauh lebih terkenal dari pada Ibnu Abi Rabi dan dia terhitung tokoh filsafat yang terbesar di dunia Islam. Dia lahir di suatu kota bernama wasij, wilayah Farab, termasuk kawasan Turkistan, pada tahun 257 H atau 950 M. beliau juga penulis produktif. Dalam bidang filsafat, etika dan kemasyarakatan saja tidak kurang dari delapan belas buku telah ditulisnya, dan tiga diantaranya tentang teori politik yaitu *Ara-ahl Al-madinah* (Pandangan-Pandangan Para Penghuni Negara yang Utama), *Tahshil al-Sa'adah* (Jalan Mencapai Kebahagiaan), *Al-Siyasah al-Madaniyah* (Politik Kenegaraan).²⁸

²⁸Munawir Sjadzali. *Op.Cit.*h.49.

Adapun pemikiran politik Islam pada Zaman Klasik oleh Farabi membagi Negara kedalam 6 macam yakni sebagai berikut :

- a. Negara yang utama atau Negara bahagia(al-Madinah al-Fadilah)

Negara yang utama atau negara Bahagia yakni negara yang diibaratkan tubuh manusia yang utuh dan sehat, semua organ dan anggota badan saling berkerja bersama dengan tugas masing-masing demi kesempurnaan tubuh dan penjagaan kesehatannya.²⁹ Menurut Al-Farabi seperti halnya tubuh didalam suatu negara memiliki warga (rakyat) dengan kemampuan dan bakat yang berbeda-beda.

Pendapat Farabi ini diwarnai oleh pandangan Plato. Untuk mendukung pendapatnya, dengan terus terang Plato dalam teorinya memerlukan *royal lie* atau “kebohongan agung”. bagian terpenting dari kebohongan tersebut adalah dogma bahwa Tuhan telah menciptakan tiga macam manusia, macam terbaik terbuat dari emas, macam yang kedua terbuat dari perak, macam yang ketiga terbuat dari kuningan dan besi.³⁰

Diantara bakat dan kemampuan yang berbeda itu terdapat seorang kepala dan sejumlah anggota masyarakat yang martabatnya mendekati kepala dan masing-masing bakat dan keahlian untuk melaksanakan tugas-tugas yang mendukung kebijakan kepala. Dibawah mereka terdapat sekelompok warga yang tugasnya membantu kelompok pertama dan kelompok ini berada pada peringkat kedua dan begitu seterusnya.

Teori Farabi bahwa sebaiknya kepala negara ada dahulu, kemudian baru rakyatnya.³¹ Menurut Farabi bahwa pentingnya adanya seorang pemimpin terlebih dahulu, kemudian dari pemimpin ini terbentuknya Negara dan

²⁹Munawir Sjadzali, *Op.Cit.*h.53.

³⁰Munawir Sjadzali, *Op.Cit.* h.54.

³¹Munawir Sjadzali, *Op.Cit.* h.55.

bagian-bagian seperti rakyat, karena dalam hal ini Farabi menilai bahwa pemimpinlah yang berwenang untuk menentukan wewenang, tugas, kewajiban serta martabat atau posisi warga negaranya.

Adapun syarat-syarat menjadi pemimpin antara lain yaitu:³²

1. Lengkap Anggota badannya
2. Baik daya pemahamannya
3. Tinggi intelektualitasnya
4. Pandai mengemukakan pendapat dan mudah dimengerti uraiannya
5. Pencinta pendidikan dan gemar mengajar
6. Tidak rakus dalam hal makanan, minuman dan wanita
7. Pencinta kejujuran dan pembenci kebohongan
8. Berjiwa besar dan berbudi luhur
9. Tidak memandang kekayaan dan kesenangan-kesenangan keduniawian
10. Pencinta keadilan dan pembenci perbuatan zalim
11. Tanggap dan tidak sukar diajak menegakkan keadilan dan sebaliknya sulit untuk melakukan atau menyetujui tindakan keji dan kotor
12. Kuat pendiriannya terhadap hal-hal yang menurutnya harus dikerjakan, penuh keberanian, tinggi antusiasme, bukan penakut dan tidak berjiwa lemah atau kerdil.

b. Negara yang bodoh (*al-Madinah al-Jahiliyah*)

Negara yang bodoh adalah kebalikan dari negara utama, negara dengan rakyatnya tidak tahu tentang kebahagiaan dan tidak terbayang pada mereka kebahagiaan itu, kalau dituntun mereka tidak mau mengikuti dan kalau diberitau tidak mau percaya³³. Negara yang tidak mempunyai tujuan yang idealsama sekali atau menganut idiologi yang salah, yang bertentangan dengan kebahagiaanmateril dan kebahagiaan spiritual.

³²Munawir Sjadzali, *Op.Cit*, h.56.

³³Munawir Sjadzali, *Op.Cit*, h.57.

Kemudian Farabi membagi negara Jahiliyah ini kedalam lima bagian antara lain: ³⁴

1. *Al-Madinah al-Dharuriyyah* (Negara kebutuhan besar)
2. *Al-Madinah al-Baddalah* (Negara jahat)
3. *Al-Madinah al-Khissah wal alsiqu* (Negara rendah dan hina)
4. *Al-Madinah al-Karimah* (Negara kehormatan/aristokratik)
5. *Al-Madinah al-Jamaiyyah* (Negara komunis)

c. Negara yang rusak (*al-Madinah al-Fasiqah*)

Negara yang rusak adalah negara yang rakyatnya tau apa kebahagiaan itu, sama halnya dengan negara yang utama, tetapi mereka berperilaku dan hidup seperti di negara bodoh. ³⁵ Negara yang penduduknya mengerti tuhan, kebahagiaan dan memiliki akal seperti negara penduduk negara utama, akan tetapi sifat dan tingkah laku penduduk negara rusak ini sama dengan orang bodoh, karena apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka lakukan sangat berbeda.

d. Negara yang merosot (*al-Madinah al-Mutabaddilah*)

Negara yang merosot adalah negara yang rakyatnya mempunyai pandangan hidup dan perilaku yang sama dengan pandangan hidup dan perilaku rakyat yang utama, kemudian berubah dan terjerumus ke dalam kehidupan yang tidak terpuji lagi, karena dalam negara ini korupsi dan pemerkosaan terhadap kebenaran dan keadilan meraja lela.

e. Negara yang sesat (*al-Madinah Al-Dhallah*)

Negara yang sesat adalah negara yang diliputi oleh kesesatan, penipuan dan kesombongan, rakyat tidak percaya akan adanya Tuhan, dan sebaliknya kepala negara menipu rakyatnya dengan pengakuan bahwa ia telah menerima wahyu dari Tuhan dan bahwa rakyat harus mengikuti apa yang ia katakan. Negara yang penduduknya memiliki yang salah terhadap Tuhan, meskipun demikian kepala negara ini tetap

³⁴ Mahmuda, "Konsep Negara Ideal/Utama (Al-Madinah Al-Fadilah) Menurut Al-Farabi". *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.2, No. 1 (September 2017), h.284.

³⁵ Munawir Sjadzali. *Op.Cit.* h.57.

menganggap bahwa dirinya menerima wahyu dari Tuhan, kemudian ia menipu penduduk dengan ucapan dan tingkah lakunya.

f. Negara rumput-rumput jahat

Negara rumput-rumput jahat adalah negara yang terdiri dari orang-orang dan unsur-unsur yang rendah budi perkertinya, manusia yang berwatak liar dan tanpa budaya yang dapat mengganggu keserasian kehidupan masyarakat di negara yang utama.³⁶

C. Tujuan Berdirinya Negara

Seperti halnya Plato, Aristoteles dan juga Ibnu Abi Rabi sebelumnya. Farabi berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat, karena tidak mampu memenuhi segala kebutuhan sendiri tanpa bantuan orang lain yang kemudian membentuk suatu tatanan kota dengan dikepalai seseorang yang berwibawa dengan jajaran pelindung wilayah serta keamanan negaranya. Adapun tujuan bermasyaakat atau bernegara menurut cendikiawan muslimitu antarlain:

- 1) “Farabi” menyatakan tujuan bernegara itu tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup, tetapi juga untuk menghasilkan kelengkapan hidup yang akan memberikan kepada manusia kebahagiaan, tidak hanya dari segi material melainkan juga sepiritual.³⁷ Dalam hal ini fungsi negara menurut Farabi tidak hanya sebatas kebutuhan dan kebahagiaan duniawi saja melainkan kebutuhan akherat. yang mengaitkan politik dengan moralitas, akhlak dan budipekerti.
- 2) “Ghazali” menyatakan tujuan bermasyarakat dan bernegara tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan material dan duniawi yang tidak mungkin dipenuhi sendirian, tetapi lebih dari itu untuk mempersiapkan diri bagi kehidupan yang sejahtera di akherat nanti melalui pengamalan dan penghayatan agama, secara benar,

³⁶Munawir Sjadzali. *Op.Cit.* h.58.

³⁷Munawir Sjadzali, *Op.Cit.*,h.51.

sedangkan yang demikian itu tidak mungkin terealisasi dengan baik tanpa keserasian kehidupan duniawi.³⁸

- 3) “Muhammad Asad” menyatakan tujuan negara itu adalah menjalankan persamaan hak dan keadilan, menuju yang hak dan menentang yang salah.³⁹
- 4) “Mustaf As Siba’I “ menjelaskan, tujuan Negara adalah untuk menegakkan hak dan keadilan bagi segenap rakyat, serta berusaha untuk memudahkan jalan mencari penghidupan dengan penuh kebahagiaan dan kedamaian.⁴⁰

D. Prinsip-Prinsip Bernegara Menurut Fiqih Siyash (Nomokrasi Islam)

Adapun prinsip-prinsip umum nomokrasi Islam sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan

Cukup banyak ayat Al-Qur’an yang berbicara tentang konsep keadilan, dalam hal yang berhubungan dengan prinsip bernegara dalam Islam akan dikutip beberapa ayat-ayat yang relevan dengan topik ini yaitu. Dalam surah an-Nisa ayat 135⁴¹.

شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ قَوْمٍ كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهِمُ اللَّهُ
قَافِرًا أَوْ غَنِيًّا كُنْ إِنَّ وَالِ الْأَقْرَبِينَ الْوَالِدِينَ أَوْ أَنْفُسِكُمْ عَلَى وَلَوْ اللَّهُ
فَإِنْ تَعَرَّضُوا أَوْ تَلَوُّوا أَوْ أَنْ تَعْدِلُوا أَنْ أَهْوَى تَتَّبِعُوا فَلَا هِمَّا أُولَى اللَّهُ
خَيْرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانُ

Artiya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah

³⁸Munawir Sjadzali, *Op.Cit*, h.76.

³⁹Zakaria Syafe’I, *Negara Dalam Perspektif Islam Fiqih Siyash* (Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012), h.38.

⁴⁰*Ibid*.h.38.

⁴¹Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit*. h.117.

biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.⁴²

Ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa menegakan keadilan yaitu:

- a. Kewajiban menegakkan keadilan bagi setiap manusia di bumi, terutama bagi orang-orang yang beriman.
- b. Setiap mukmin yang menjadi saksi diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.⁴³ Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa menjadi saksi dengan sejujur-jujurnya bukan hanya berlaku bagi kaum mukmin saja, akan tetapi berlaku bagi semua lapisan masyarakat baik Muslim maupun non-Muslim
- c. Manusia dilarang mengikuti hawa nafsu dan manusia dilarang menyelewengkan kebenaran.

Allah juga mengulangi lagi kewajiban manusia menegakkan keadilan dan menjadi saksi yang adil dalam surah al-Maidah Ayat 8

قَوَّامِينَ كُونُوا أَمْثَلُ الَّذِينَ يَتَأْتِيهِ اللَّهُ
دَلِيلًا تَعْدِلُوا أَلَّا عَلَى قَوْمٍ شَرٌّ أَنْ يَجْرِمَكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شُهُدَاءَ
وَاتَّقُوا لِلتَّقْوَى أَقْرَبُ هُوَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَعْمَلُونَ بِمَا خَيْرٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah

⁴²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publisher, 2007), h.131.

⁴³Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit.* h.118.

sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni pertama, sama halnya dalam ayat sebelumnya bahwa terdapat perintah kepada orang yang beriman supaya menjadi manusia yang lurus (adil) dari perkataan karena Allah. Kedua, adanya perintah kepada orang-orang yang beriman supaya menjadi saksi yang adil, artinya dalam kesaksiannya itu , ia tidak memihak kepada siapapun, kecuali kepada kebenaran. ketiga, larangan kepada orang-orang yang beriman untuk bersikap adil, karena motivasi emosional atau sentimen yang negatif (benci) kepada sekelompok manusia.⁴⁴

Untuk menjadi saksi yang adil dalam hal ini penulis berpendapat bahwa setiap orang yang akan menjadi saksi harus terlepas dari suatu perasaan apapun dalam arti bahwa dilarang untuk belas kasih kepada suatu kelompok atau orang tertentu saat menjadi saksi, terkecuali boleh dalam hal kebenaran. Keempat, perintah kepada orang-orang yang beriman supaya bersikap adil, karena adil lebih dekat dengan taqwa.

Ayat Al-Qur'an yang mengandung perintah menegakkan keadilan diantara sesama manusia itu yaitu surah Al-Maidah ayat 8, an-Nahl ayat 90, an-Nisa ayat 58, an-Nisa ayat 135, Al-Maidah ayat 8, Al-An'am ayat 90, Asy-syura ayat 15.⁴⁵ Keadilan merupakan prinsip Dalam Islam keadilan merupakan kebenaran dan kebenaran merupakan salah satu nama Allah, dalam islam keadilan merupakan hal yang sangat penting dalam Islam, karena Allah sendiri memiliki sifat adil (keadilan penuh dan dengan kasih sayang kepada makhluknya) hal ini sesuai dengan surah Al-An'am ayat 160.

⁴⁴Muhammad Tahir Azhari,*Op.Cit.* h.119.

⁴⁵Muhammad Tahir Azhari,*Op.Cit.* h.120-121.

مَا إِلَّا تُجْزَىٰ فَلَا بِالسَّيِّئَةِ جَاءَ وَمِنْ أَمْثَالِهَا عَشْرُفَلَهُ بِالْحَسَنَةِ جَاءَ مَنْ
يُظْلَمُونَ لَا وَهُمْ مِثْلَهُ

*Artinya : Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barangsiapa yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).*⁴⁶

Prinsip keadilan dalam nomokrasi Islam mengandung suatu konsep yang bernilai tinggi. Ia tidak identik dengan keadilan yang diciptakan manusia. Sebaliknya konsep nomokrasi Islam menempatkan manusia pada kedudukan yang wajar baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Manusia bukanlah merupakan titik sentral, melainkan ia hanya hamba Allah yang nilai-nilainya ditentukan oleh hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia menurut Al-Qur'an *hablun min Allah wa hablun min al-as*.

⁴⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publisher, 2007), h. 113.

2. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah

Perkataan amanah tercantum dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ

مُوَأَنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِهِمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تَوَدُّوْا أَنْ يَأْمُرَكُمْ
إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ ۝٥٨ بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*⁴⁷

Apabila ayat tersebut dirumuskan menggunakan metode pembentukan garis hukum sebagaimana yang diajarkan oleh Hazairin dan dikembangkan oleh Sayjuti Thalib, maka dari ayat tersebut dapat ditarik dua garis hukum yaitu⁴⁸:

- a. Manusia diwajibkan untuk menyampaikan amanah atau amanat kepada yang berhak.
- b. Manusia diwajibkan untuk menetapkan hukum dengan adil.

Kekuasaan adalah amanah, amanah wajib disampaikan kepada orang yang berhak menerimannya dalam arti dipelihara dan dijalankan atau diterapkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip nomokrasi Islam.⁴⁹ Amanah dalam hal ini seperti jabatan, Bupati, Wali Kota, Menteri, maupun Presiden maka semua itu hakikatnya sebagai pemegang amanah yang diberikan Allah SWT sebagai karunia-Nya, dan merupakan tugas yang diberikan rakyat kepada pemimpinnya yang harus

⁴⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publisher, 2007), h.72.

⁴⁸Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit.* h.106.

⁴⁹Muhammad Tahir Azhari. *Op.Cit.*h.107.

dilaksanakan dengan baik dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang.

Kekuasaan juga harus didasari dengan prinsip menegakkan keadilan yang merupakan suatu perintah Allah yang wajib dilaksanakan dan juga pertanggung jawaban yang berat, tidak hanya didunia, melainkan juga pertanggungjawaban di akherat. Menurut aturan Islam, seorang pemimpin adalah wakil dari rakyat yang bertugas mewujudkan maslahat bagi umat dan menjaga eksistensi agama sesuai dengan tuntutan hukum syara.⁵⁰

Aturan politik Islam berbeda dengan aturan kekuasaan Teokrasi Barat, karena dalam hal kekuasaan dipegang oleh biokrasi atas nama Tuhan yang berarti seorang pemimpin itu merupakan wakil dari Allah dan bukan dari rakyat.

3. Prinsip Musyawarah

Dalam Al-Qu'ran prinsip musyawarah terdapat dalam surah Al-Imran ayat 159



.Artinya:.,Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka.Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.karena itu ma'afkanlah mereka,

⁵⁰ Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi Menguak Kekeliruan Pandang Harapannya Umat Terlibat Pemilu dan Politik* (Jakarta: Pustaka Al-Khausar, 2013), h.55.

*mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*⁵¹

Prinsip musyawarah ini berbeda dengan pandangan Demokrasi Liberal yang berpegang pada rumus “setengah plus satu” atau suara mayoritas yang lebih dari separuh sebagai hasil kesepakatan.⁵² Musyawarah disini dapat diartikan sebagai suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan masalah Adapun prinsip-prinsip bermusyawarah dalam demokrasi Islam antara lain :

- a) Musyawarah bertujuan melibatkan atau mengajak semua pihak untuk berperan serta dalam kehidupan bernegara.
- b) Harus dilandasi jiwa persaudaraan yang dilandasi iman karena Allah
- c) Tujuan musyawarah ditujukan untuk kemaslahatan rakyat.
- d) Dalam musyawarah yang terpenting bukan pada siapa yang berbicara, melainkan gagasan atau pemikiran apa yang dibicarakan
- e) Dalam Islam tidak mengenal oposisi (pihak-pihak yang tidak mendukung pemerintah atau melepaskan tanggung jawab bernegara).
- f) Suatu keputusan dapat pula diambil dari suara terbanyak dan kesepakatan atau hasil dari musyawarah dalam Islam lazim disebut sebagai *Ijma*. Dalam melakukan *Ijma* harus ada dalil yang dijadikan pegangan oleh mujtahid yang melakukan kesepakatan hukum dari suatu masalah tertentu, para ulama berbeda pendapat tentang kemestian adanya

⁵¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publisher, 2007), h. 90.

⁵² Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit.* h.112.

mustanad dalam kesepakatan hukum yang terjadi, yang dibagi menjadi dua kelompok yakni :⁵³

Petama, jumhur ulama berpendapat, setiap *Ijma* harus memiliki *mustanad*, baik berupa dalil nash Al-Quran maupun Sunnah ataupun *Qiyas*. Setiap fatwa hukum yang menjadi *Ijma*, yang tidak memiliki *mustanad* adalah salah, hal itu berarti menetapkan hukum agama tanpa dasar. Allah berfirman pada surah Al-Isra ayat 36

يٰۤاَيُّهَا كُلُّۤٓاَلْفُوۡا۟دَّوَالْبَصۜرَ السَّمۜعَ اِنْ عَلِمۜتۜ بِهٖ لَكَ لَیۜسَ مَا تَقۜفُوۡلَا

مَسۜئُوۡلًا عَنْهٗ كَانَ اُوۡلَا

Artinya: dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.⁵⁴

Kedua, kelompok yang berpendapat, untuk terjadinya *Ijma*, tidak dipersyaratkan adanya *musanad*. *Ijma* dapat saja terjadi meskipun tanpa *mustanad*, asalkan ada kesepakatan pada umat Islam, dimana hal itu terjadi melalui ilham yang diilhamkan oleh Allah kepada mereka yang melakukan kesepakatan untuk menemukan kebenaran.

Perbedaan pendapat diatas berpangkal pada pertanyaan “apakah ilham dapat diakui sebagai sumber syara tau tidak. Dalam hal ini, jumhur ulama berpendapat ilham tidak dapat menjadi dalil syarasementara sebagian ulama lainnya, seperti Fakhurrazi, Ibn ash-Shalah, dan golongan Syiah berpendapat, setiap *ijma* mesti melalui dalil syara, dimana Islam itu sendiri termasuk dalil syara.

Al-Quran memerintahkan musyawarah dan menjadikannya sebagai satu unsur dari unsur-unsur pijakan

⁵³ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta:Amzah,2014), h.158.

⁵⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publisher, 2007), h. 389.

Negara Islam.⁵⁵ Dalam hal ini musyawarah adalah hak partisipasi rakyat dalam masalah-masalah hukum dan pembuatan keputusan politik, seperti hak mereka untuk memilih pemimpin, dan juga hak untuk mengawasi jalannya pemerintah sesuai dengan prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar*, sehingga wajib bagi pemerintah untuk membuat undang-undang yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.

Sebagai prinsip, maka Al-Qur`an dan Sunnah tidak mengaturnya. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada manusia untuk mengatur dan menentukannya.⁵⁶ Pada waktu itu, musyawarah cukup dilakukan di mesjid, karena pada hakekatnya mesjid merupakan pusat seluruh kegiatan baik ibadah maupun mu'amalat. Tradisi ini berlanjut pada keempat khalifah yang menggantikan Rasulullah yaitu, Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali.

4. Prinsip persamaan

Prinsip persamaan dalam Islam dapat dipahami dalam Al-Quran, surah Al-Hujarat ayat 13.⁵⁷

فَوَأَوْقَبَآيِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنٰكُمْ ؕأُنْثٰى ذَكَرٍ مِّنْ خَلْقِنٰكُمْ إِنَّا الْنَاسُ سِيَّئٰتُهَا
عِنْدَ أَكْرَمِكُمْ إِن لِّتَعَارَآلِلَّهِ إِن تَقْنَكُمُ اللّٰهُ خَيْرٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa*

⁵⁵ Farid Abdul Khaliq, *Op.Cit.* h..36.

⁵⁶ Muhammad Tahir Azhari. *Op.Cit.* h.114.

⁵⁷ Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit.* h.124.

*diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*⁵⁸

Ayat diatas menceritakan bagaimana manusia tercipta dari pasangan laki-laki dan wanita yakni adam dan hawa dan dilanjutkan oleh pasangan yang lainnya melalui suatu proses perkawinan ayah dan ibu. Proses penciptaan yang seragam itu merupakan suatu kriterium bahwa pada dasarnya semua manusia itu adalah sama. Prinsip persamaan ini salah satu tiang utama dalam membangun negara hukum menurut Al-Qur'an dan Sunnah.⁵⁹

Ukuran ketinggian derajat manusia dalam pandangan Islam bukan ditentukan oleh nenek moyangnya, kebangsaannya, warna kulit, jenis kelamin dan lain sebagainya yang berbaur realitas.⁶⁰ Kualitas dan ketinggian derajat seseorang ditentukan oleh ketakwaan yang ditunjukkan dengan prestasi kerjanya yang bermanfaat bagi manusia, maka atas ukuran ini, maka dalam Islam semua orang memiliki kesempatan yang sama. Persamaan dalam Al-Quran pula pada dasarnya memberikan justifikasi yang sangat jelas tentang kesejajaran antara laki-laki dan perempuan tentang politik yakni terdapat dalam ayat Al-Quran sura An-An'am ayat 165 dan surah Al-Baqarah ayat 30 yakni:⁶¹

⁵⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publisher, 2007), h.726.

⁵⁹ Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit.* h.125

⁶⁰ Abuddin Nata, *Metodelogi Studi Islam*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h.88.

⁶¹ Arief Subhan dkk, *Citra Perempuan dalam Islam Pandangan Orman Keagamaan* (Jakarta: PT SUN, 2003), h.70.

سَتَعْصِفُ فَوْقَ بَعْضِكُمْ وَرَفَعَ الْأَرْضَ خَلِيفَ جَعَلَكُمْ الَّذِي وَهُوَ
 رَحِيمٌ لِّغُفُورٍ إِنَّهُ الْعِقَابُ سَرِيعٌ رَبُّكَ إِنَّ أَتٰكُمْ مَا فِى لِّبَابِكُمْ دَرَجَ



Artinya: dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-
 penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas
 sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu
 tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya
 Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia
 Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁶²

نَ فِيهَا أَتَجْعَلُ قَالُوا خَلِيفَةً الْأَرْضِ فِي جَاعِلُ إِنِّي لِلْمَلَكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَإِذْ
 مِ إِنِّي قَالَ لَكَ وَنُقَدِّسُ مُحَمَّدٌ نُسَبِّحُ وَنَحْنُ الدِّمَاءُ وَيَسْفِكُ فِيهَا يُفْسِدُ

تَعْلَمُونَ لَا مَا أَعْلَا

Artinya: ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para
 Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang
 khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau
 hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan
 membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah,
 Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau
 dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya
 aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."⁶³

⁶²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah 30 Juz* (Solo:
 Qomari Prima Publisher, 2007), h.202.

⁶³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah 30 Juz* (Solo:
 Qomari Prima Publisher, 2007), h.6.

Pada dasarnya hak seorang perempuan itu sama dengan laki-laki, maka dalam hal ini seorang wanita dapat menjadi seorang pemimpin apabila telah memenuhi syarat-syarat memimpin. Perbedaan antara keduanya hanyalah pada fungsi utama dari masing-masing jenis sesuai dengan kodranya seperti melahirkan, menyusui, dan wanita tetap berkewajiban menghormati suaminya sebagai kepala keluarga.

Prinsip persamaan dalam Islam mencakup bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Prinsip ini telah ditegakkan oleh Nabi Muhammad saw sebagai kepala negara Madinah, ketika ada sementara pihak yang menginginkan dispensasi karena tersangka berasal dari kelompok elit. Namun Nabi berkata “..Demi Allah, seandainya Fatimah putriku mencuri tetap akan kupotong tangannya”. Secara mutlak semua manusia sama-sama mempunyai kewajiban untuk menyempurnakan kehendak Allah dan mereka akan diadili menurut timbangan keadilan yang mutlak dan sama. Dari ayat diatas adapun pokoknya sebagai berikut⁶⁴:

- a) Semua manusia adalah Khalifah Allah diatas bumi untuk mengelola dan mengatur bumi demi kemaslahatan manusia.
- b) Dari segi kewajiban manusia memiliki kewajiban yang sama secara mutlak dan apabila mereka tidak melaksanakannya dengan baik maka mereka akan diadili menurut timbangan keadilan yang mutlak dan sama.
- c) Karena sifat Allah yang maha adil maka sikap diskriminasi dalam islam ditolak.

Perinsip dimaksud untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan umat, sebagaimana dengan Al-Quran surah al-Anfaal ayat 46

⁶⁴Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit.* h.128-129.

إِنْ وَأَصْبِرُوا وَارْتَحِمُوا وَتَذَبَّاهُمْ فَتَفْشَلُوا وَتَنْزَعُوا وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

الصَّابِرِينَ مَعَ

Artinya: dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.⁶⁵

5. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia

Dalam nomokrasi Islam hak-hak asasi manusia bukan hanya diakui tetapi juga dilindungi sepenuhnya. Prinsip-prinsip itu ditegaskan dalam Al-Qur'an antara lain dalam surah Al-Isra ayat 70

طَيَّبْتُمْ. وَرَزَقْنَاهُمْ وَالْبَحْرِ الْبَرِّيَّ وَحَمَلْنَاهُمْ آدَمَ بَنِي كَرَّمْنَا وَلَقَدْ

تَفْضِيلًا خَلَقْنَا مِمَّنْ كَثِيرٍ عَلَى وَفَضَّلْنَاهُمْ آلَ

Artinya : Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.⁶⁶

Ayat tersebut mengekspresikan kemuliaan manusia dalam Al-Qur'an dengan istilah karamah (kemuliaan). Menurut Mohammad Hasbi Ash-Shiddieqy membagi karamah itu

⁶⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publisher, 2007), h. 247.

⁶⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publisher, 2007),h. 394.

menjadi tiga kategori yaitu (1) kemuliaan pribadi atau *karamah fardiyah* yang artinya dilindungi pribadinya maupun hartanya, (2) kemuliaan atau *karomah ijtimaiyah* yang artinya persamaan dijamin sepenuhnya dan (3) kemuliaan politik atau *karomah siyasah* yang artinya Islam meletakkan hak-hak politik dan menjamin hak-hak itu sepenuh bagi setiap orang warga negara, karena kedudukannya yang dalam Al-Quran disebut sebagai Khalifah.⁶⁷

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dalam nomokrasi Islam ditekankan pada tiga hal yaitu persamaan manusia, martabat manusia, kebebasan manusia. Karena itu Al-Quran menentang dan menolak setiap bentuk perlakuan dan sikap yang mungkin dapat menghancurkan prinsip persamaan. Sedangkan *karamah* manusia diciptakan oleh Allah dengan martabat atau perlengkapan fisik yang tidak terdapat pada makhluk lain. Al-Quran pun menekankan tidak adanya paksaan untuk memeluk agama Islam. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqoroh ayat 256



Artinya: tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut [162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.⁶⁸

⁶⁷Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit.* h.130.

⁶⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publisher, 2007), h.53.

Karena dalam kehidupan Rasulullah SAW pun memberikan contoh yang paling baik untuk bertoleransi, saling memaafkan, kasih sayang, dan perdamaian.

6. Prinsip Peradilan Bebas

Prinsip peradilan bebas dalam ini memiliki makna kewenangan hakim pada setiap putusan yang ia ambil bebas dari pengaruh siapapun, dan wajib pula memperhatikan prinsip amanah sebagaimana yang tercatum dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58.⁶⁹

سَإِنَّ اللَّهَ

مُوَأَنَّ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتِهِمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تَوَدُّوَأَنَّ يَأْمُرُكُمْ

سَإِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعْظُمُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ ۝ بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ

Artinya:...Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.⁷⁰

Secara hukum diakui bahwa faqih yang adil mampu untuk menengahi perselisihan-perselisihan dan memutuskan perkara-perkara hukum.⁷¹ Para penganut Immamiah percaya bahwa fungsi ini (*wilayat al-qada* atau *al-hukuma*) termasuk dalam otoritas illahiah seorang imam atau pemimpin, maka dalam hal ini sangat penting untuk melakukan pengujian dan

⁶⁹ Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit.* h.144.

⁷⁰ *Ibid.* h.113.

⁷¹ Ahmed Vaezi, *Agama Politik Nalar Politik Islam* (Jakarta: Citra, 2006), h.88.

penyeleksian seorang yang akan menjadi hakim, agar kelak mereka dapat bertindak adil dalam menangani perkara hukum.

7. Prinsip Perdamaian

Al-Quran dengan tegas menyeru kepada orang-orang yang beriman agar masuk kedalam perdamaian. Nomokrasi Islam harus ditegakkan dengan prinsip perdamaian. Hubungan dengan Negara-negara lain harus dijalin dan berpegang pada prinsip perdamaian. Prinsip perdamaian ini ditegaskan yakni tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 208.⁷²

خُطُّوْا تَتَّبِعُوْا وَلَا كَافَّةَ السِّلْمِ فِيْ اَدْخُلُوْا اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ يَتَّيُّهَا
مُّبِيْنٌ عَدُوْلَكُمْ اِنَّهٗ الشَّيْطٰنُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu⁷³

Dalam hubungan bertetangga dengan Negara lain, masing-masing Negara wajib menghormati hak-hak negara lain yang bertetangga dengan negara Islam.⁷⁴ Dalam mewujudkan perdamaian antar negara maka dibuatlah perjanjian mengenai hak dan kewajiban antar negara tersebut yang sekarang lebih kita kenal dengan perjanjian Internasional. Prinsip perdamaian ini wajib ditaati oleh setiap negara dan warga negaranya.

Hal lain yang menyebabkan perjanjian ini tidak ditaati oleh negara yang bersangkutan disebabkan karena hal-hal tertentu yang sifatnya darurat (alasan yang benar dan adil) seperti mempertahankan diri dari apabila terjadi perang. Islam

⁷²Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit.* h.146.

⁷³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publisher, 2007), h.3.

⁷⁴AZazuli, *Fiqih Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Bandung: Prena Media, 2003), h. 207.

adalah agama yang berwatak damai dan mementingkan al-akhlaq al-karimah, hal inipun ditunjukan bukan hanya ketika damai, tetapi juga diwaktu perang.

Penyebabkan peperangan diantaranya adalah fitrah manusia sebagai makhluk yang tidak sempurna, yang dapat berbuat salah. Dengan kemampuan manusia untuk berbuat salah, maka akan selalu ada orang yang memilih melanggar watak dirinya dan batas-batas ketentuan tuhan.⁷⁵ Watak lain dari manusia yang ingin hidup di atas bumi dalam keadaan harmonis dan damai dengan makhluk hidup lain ini lah yang menimbulkan rasa tanggungjawab untuk mewujudkannya perdamaian.

Fungsi manusia sebagai khalifah atau pemimpin di bumi inilah yang harus tetap mempertahankan perdamaian, namun disisi lain kedamaian yang sejati bukanlah tanpa adanya peperangan, tetapi mencegah adanya faktor-faktor yang menyebabkan percecokkan atau konflik yang pada akhirnya menyebabkan kesia-siaan dan kerusakan.

8. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip keadilan dalam demokrasi Islam bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat.⁷⁶ Bukan hanya mencakup kebutuhan materil saja, kewajiban Negara juga mencakup pemenuhan kebutuhan spiritual, hal ini bertujuan mencegah penimbunan harta seseorang atau sekelompok orang. Dalam Islam prinsip kesejahteraan diwujudkan melalui pentingnya zakat dalam Negara hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103

صَلُّوا تَكَانَ عَلَيْهِمْ وَصَلِّ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ حُذِّ

وَأَهُمْ سَكَنَ اللَّهُ ﷻ عَلِيمٌ سَمِيعٌ

⁷⁵ Mun'im A Sirry, *Membendung Militansi Agama Imam dan Politik dalam Masyarakat Modern* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2003), h.73.

⁷⁶ Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit.* h.150.

*Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*⁷⁷

9. Prinsip Ketaatan Rakyat

Hubungan antara pemerintah dan rakyat, al-Quran telah menetapkan suatu prinsip yang dapat dinamakan sebagai prinsip ketaatan rakyat. Prinsip itu ditegaskan dalam surah an-Nisa ayat 59.⁷⁸

أَطِيعُوا أَمْرًا مِّنَ الَّذِينَ يَتَأْتُوا اللَّهَ

سَّإِلَىٰ فَرْدُوهُ شَيْءٍ فِي تَنْزَعْتُمْ فَإِنَّ مِنْكُمْ أَلَمْرُؤًا إِلَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ

أَوَّلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَٰلِكَ إِلَّا خِرًا وَلَيَوْمَ يَأْتِي اللَّهُ تَوْمَنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ



*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*⁷⁹

Hazairin menafsirkan “menaati Allah” ialah tunduk kepada ketetapan Allah”, menaati Rasul” ialah tunduk kepada

⁷⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publisher, 2007), h. 273.

⁷⁸Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit.* h.153.

⁷⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publisher, 2007),h. 114.

ketetapan-ketetapan Rasul yaitu Nabi Muhammad saw dan menaati Ulil amri” ialah tunduk kepada ketetapan-ketetapan petugas-petugas kekuasaan masing-masing dalam lingkungan tugas kekuasaannya.⁸⁰ Sesungguhnya ulil amri bukan hanya mereka yang memiliki kewenangan dan kekuasaan saja, tetapi juga para sarjana muslim- terutama sarjana hukum Islam yang memenuhi syarat untuk berijtihad.

Dari Sembilan prinsip tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari prinsip-prinsip nomkrasi Islam tersebut memiliki kesamaan tujuan yakni untuk menegakkan maqasidu syariah yakni *hifzul din* (memelihara agama), *hifzun nafsi* (memelihara jiwa), *hifzun aql* (memelihara akal), *hifzun nasb* (menjaga keturunan), *hifzun mal* (menjaga harta) sebagai upaya penegakan kemaslahatan umat baik dunia maupun kemaslahatan akherat. Dalam hal ini sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran tidak secara eksplisit menyebutkan dasar-dasar hukum secara keseluruhan maka dalam hal ini jika tidak ditemukan dalam Al-Quran dan matan hadis dibutuhkan ijtihad para ulama dalam menentukan dan menetapkan suatu hukum, yakni dengan memahami isi (substansi) dan jiwa spirit Islam sepanjang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama Islam.

⁸⁰ Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit.*h.153.



BAB III

NEGARA HUKUM PERSPEKTIF PANCASILA

A. Pengertian Negara Hukum Pancasila

Membahas pengertian Negara Hukum Pancasila terlebih dahulu penulis akan membahas macam-macam negara hukum menurut ilmu politik. Menurut Tahir Azhary, ada lima konsep negara hukum yang berkembang dan dilaksanakan di dunia⁸¹. Pertama, negara hukum menurut konsep negara Eropa Kontinental (*rechstasstat*). Menurut Scheltama, unsur-unsur *rechstaat* adalah kepastian hukum, persamaan, demokrasi dan pemerintah yang melayani kepentingan umum.⁸² Konsep *rechstaat* ini semula berdasarkan filsafat liberal sekuler yang bersifat individualistik, peradilan administrasi negara merupakan suatu sarana yang penting dan sama sekali tidak didasarkan pada agama, karena mereka telah mencampakan kehidupan beragama dalam kehidupan berpolitik.

Kedua, konsep negara hukum *Rule of Law* yang semula dipelopori oleh A.V. Dicey (1835-1922), konsep ini menekankan pada tiga unsur yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di depan hukum (*equal before the law*), dan konstitusi yang didasarkan atas hak perorangan (*the constitution based on individual right*).

Ketiga, konsep *Socialist Legality*, adalah konsep negara hukum yang dianut oleh negara-negara sosial-komunis dalam rangka mengimbangi konsep *rule of law* dari Anglo-saxon. Negara hukum *Socialist Legality* bercirikan sebagai berikut yakni menempatkan hukum dibawah sosialisme. Hukum merupakan alat untuk mencapai sosialisme. Dalam *Socialist Legality* individu ditempatkan pada posisi dibawah kekuasaan negara dan segelintir elite penguasa sosialis-komunis. Keempat, konsep negara hukum Nomokrasi Islam, negara dalam Islam tidak dapat dikatakan sebagai teokrasi yang dipahami di Barat.⁸³ Dalam nomokrasi Islam, kepala negara menjalankan pemerintahan tidak

⁸¹ Muhammad Iqbal, *Op.Cit*, h.230.

⁸² Muhammad Iqbal, *Op.Cit*, h.232.

⁸³ Muhammad Iqbal, *Op.Cit.*, h.235.

berdasarkan mandat Tuhan, tetapi berdasarkan hukum-hukum syariat yang diturunkan Tuhan kepada manusia melalui Rasulnya Muhammad SAW.

Kelima, konsep negara hukum Pancasila adalah aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Dalam hal ini penulis akan mengkhususkan pada pengertian Konsep Negara Hukum Pancasila. Konsep Negara hukum Pancasila, idealnya, mengakui kebebasan individu sebagaimana ditegaskan dalam UUD-1945 Pasal 28. Namun disisi lain, konsep ini menekankan peran pemerintah dalam menguasai sumber-sumber daya alam yang penting dan dibutuhkan oleh rakyat banyak untuk kepentingan kemakmuran rakyat.

Konsep negara hukum Pancasila, meskipun tidak menjadikan salah satu agama sebagai agama resmi negara, menjamin kebebasan bagi rakyatnya untuk menjalankan agamanya. Negara tidak memisahkan agama dari kehidupan politik.⁸⁴

Pancasila yang berarti lima dasar atau lima asas, adalah nama dasar negara kita Republik Indonesia. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad XIV, yaitu terdapat dalam buku *Negarakartagama* karangan *Prapanca* dan buku *Sutasoma*. Pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Ir Suckarno mengusulkan agar dasar negara Indonesia diberi nama Pancasila.⁸⁵ Sebelum membahas apa itu konsep negara hukum Pancasila itu maka terlebih dahulu penulis menjabarkan hakikat pengertian dari lima Pancasila tersebut adapun hakikat pengertian lima sila Pancasila tersebut adalah sebagai berikut⁸⁶:

⁸⁴ Muhammad Iqbal, *Op.Cit.* h.234.

⁸⁵ Darji Darmodiharjo dkk, *Op.Cit.*, h.14.

⁸⁶ Darji Darmo, dkk, *Santiaji Pancasila cetakan 10* (Surabaya: Usaha Nasional, 1991), h.38.

1. Sila pertama, Ketuhanan yang maha Esa

Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, ialah Allah, pencipta segala yang ada dan semua makhluk. Yang maha Esa yang berarti maha tunggal, tiada sekutu dalam zat-Nya, esa dalam sifat-Nya, esa dalam perbuatan-Nya, artinya Tuhan tidak terdiri dari zat-zat yang banyak lalu menjadi satu, bahwa sifat Tuhan adalah sesempurna-sempurnanya, bahwa perbuatan Tuhan tidak dapat disamai oleh siapapun. Jadi ketuhanan yang maha Esa mengandung pengertian dan keyakinan bahwa adanya Tuhan yang maha Esa, pencipta alam dan semestinya.

Keyakinan adanya Tuhan yang maha Esa itu bukanlah suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal pikiran, melainkan suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar yang dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika.

Atas keyakinan yang demikian, maka negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa dan negara memberikan jaminan kebebasan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Bagi dan didalam negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan tentang ketuhanan yang maha Esa, tidak boleh ada perbuatan anti agama, serta tidak boleh ada paksaan agama. Adapun rincian butir-butir sila pertama antara lain sebagai berikut.⁸⁷

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaannya terhadap Tuhan yang maha Esa
2. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan yang maha Esa, sesuai dengan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan berkerjasama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang maha Esa

⁸⁷ Undang-Undang Dasar 1945, h.39.

4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang maha Esa
5. Agama dan kepercayaan kepada Tuhan yang maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang maha Esa yang dipercaya dan diyakininya.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
7. Tidak memaksakan suatu ^{agama} dan kepercayaan terhadap Tuhan yang maha Esa kepada orang lain.

2. Sila yang kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab.⁸⁸

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa karsa, dan cipta. Karena potensi ini manusia menduduki atau memiliki martabat yang tinggi. Dengan akal budinya, manusia menjadi berkebudayaan. Dengan naruninya, manusia menyadari nilai-nilai, norma-norma. Adil terutama yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang.

Beradab berasal dari kata adab yang berarti budaya. Jadi, adab berarti berbudaya. Ini mengandung arti bahwa setiap hidup, keputusan dan tindakan selalu berdasarkan nilai-nilai budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan (moral). Adab terutama mengandung pengertian tata kesopanan, kesusilaan atau moral. Dengan demikian beradab dapat ditafsirkan sebagai nilai-nilai kesusilaan atau moralitas khususnya dan kebudayaan umumnya.

Didalam sila ke dua ini, telah tersimpul cita-cita kemanusiaan yang lengkap, yang memenuhi seluruh hakikat manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab, maka setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama terhadap undang-undang negara, mempunyai kewajiban dan hak-hak yang sama, setiap warga negara dijamin haknya serta kebebasan yang

⁸⁸ Darji Darmo, dkk, *Ibid.*, h.39.

menyangkut hubungan dengan Tuhan, dengan orang-orang seorang, dengan negara, dengan masyarakat, dan menyangkut pula kemerdekaan menyatakan pendapat dan mmencapai kehidupan yang layak sesuai dengan hak asasi manusia.

Adapun rincian butir sila kedua ini antara lain sebagai berikut:⁸⁹

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagi makhluk Tuhan yang maha Esa
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia
4. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tanpa selira.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia`.
10. Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan berkerjasama dengan orang lain.

3. Sila ketiga, Persatuan Indonesia⁹⁰

Persatuan berarti satu, tidak terpecah belah, persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Indonesia mengandung dua makna pertama, makna geografis yang berarti sebagai bumi yang membentang dari 95° -141° bujur timurdan 6° lintang utara sampai 11° lintang selatan, kedua, makna bangsa Dalam arti

⁸⁹ Undang-Undang Dasar 1945, h.40.

⁹⁰ Darji Darmo, dkk, *Ibid.*, h.42.

politis yaitu bangsa yang hidup dalam wilayah itu. Indonesia dalam sila ke III ialah Indonesia dalam pengertian bangsa. Jadi, persatuan Indonesia persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang mendiami Indonesia ini bersatu karena terdorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan bangsa Indonesia, bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Adapun rincian dari sila ketiga antara lain sebagai berikut⁹¹:

1. Mampu menempatkan persatuan dan kesatuan, serta kepentingan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi atau golongan.
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, apabila diperlukan.
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
4. Menegmbangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika.
7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Sila ke empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.⁹²

Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yang berarti sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah tertentu. Kerakyatan dalam hubungan sila IV ini berarti bahwa kekuasaan yang tertinggi berada ditangan rakyat. Kerakyatan disebut pula kedaulatan rakyat (rakyat berdaulat dan berkuasa) atas demokrasi (rakyat yang memerintah). Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu

⁹¹Undang-Undang Dasar 1945, h.40.

⁹² Darji Darmo, dkk, *ibid.*, h. 44.

mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur dan bertanggung jawab serta didorong oleh itikad baik sesuai dengan hati nurani.

Perwakilan adalah suatu sistem tata cara (prosedur) mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. Jadi, kerakyatan/perwakilan berarti bahwa rakyat dalam menjalankan kekuasaan melalui sistem perwakilan dan keputusan-keputusan yang diambil dengan jalan musyawarah yang dipimpin oleh pikiran yang sehat serta penuh tanggung jawab, baik kepada Tuhan yang maha Esa maupun kepada rakyat yang diwakilinya. Adapun rincian butir dari sila ke empat antara lain sebagai berikut:⁹³

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai musyawarah.
6. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
7. Dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang jujur.
9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan yang maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan manusia,

⁹³ Undang-Undang Dasar 1945, h.41.

mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melakukan permusyawaratan.

5. Sila ke lima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁹⁴

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat disegala bidang kehidupan, baik material maupun sepiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadai rakyat Indonesia, baik yang berdiam diwilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa bangsa Indonesia mendapat perlakuan yang adil dibidang huukum, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Sesuai dengan UUD 1945 makna keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur.

Oleh karena itu kehidupan manusia itu meliputi kehidupan jasmani dan rohani, maka keadilan itu pun meliputi keadilan di dalam pemenuhan tuntutan-tuntutan hakiki bagi kehidupan rohani. Dengan kata lain keadilan itu meliputi keadilan dibidang material dan spiritual. Pengertian ini mencakup pula pengertian adil dan makmur yang dapat diminati oleh seluruh bangsa Indonesia secara merata, dengan berdasarkan asas kekeluargaan.

Sila keadilan sosial adalah tujuan dari empat sila yang mendahuluinya, merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yang perwujudannya ialah tata masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Adapun rincian butir-butir sila kelima ini antara lain sebagai berikut⁹⁵:

1. Mengembangkan perbuatan luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.

⁹⁴ Wahyu Widodo & Budi Anwari, *Pendidikan Pancasila Hakikat, Pengamalan & Nilai-Nilai Dalam Pancasila* (Yogyakarta: Andi, 2015), h. 46.

⁹⁵ Undang-Undang Dasar 1945, h.41-42.

3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan kepada orang lain.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
8. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan atau kepentingan umum.
9. Suka berkerja keras.
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial.

Menurut ketetapan MPR No. III/MPR/2000 menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum nasional. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara maka Pancasila berfungsi sebagai berikut⁹⁶:

1. Sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia.
2. Suasana kebatinan Indonesia (*Geistlichenhintergrund*) dari UUD)
3. Cita-cita hukum bagi hukum dasar negara.
4. Norma-norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintahan dan lain-lain penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
5. Sumber bagi semangat bagi UUD RI 1945, penyelenggara negara, pelaksana pemerintahan.

⁹⁶ Wahyu Widodo & Budi Anwari, *Pendidikan Pancasila Hakikat, Pengamalan & Nilai-Nilai Dalam Pancasila* (Yogyakarta: Andi, 2015), h.124.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara merupakan semangat bagi UUD RI 1945, penyelenggara negara, pelaksana pemerintahan, oleh karena itu Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 telah mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara.

Pancasila adalah suatu pandangan hidup atau ideologi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, antar manusia, manusia dengan masyarakat atau bangsanya, dan manusia dengan alam lingkungannya. Alasan Pancasila dijadikan prinsip, pandangan hidup dengan fungsinya antara lain sebagai berikut⁹⁷:

1. Mengakui adanya kekuatan gaib yang ada diluar diri manusia sebagai pencipta serta pengatur serta penguasa alam semesta.
2. Keseimbangan dalam hubungan, keserasian-keserasian dan untuk menciptakannya perlu mengendalikan diri.
3. Dalam mengatur hubungan, peran dan kedudukan bangsa sangat penting. Persatuan dan kesatuan sebagai bangsa merupakan nilai sentral.
4. Kekeluargaan, gotong-royong, kebersamaan, serta musyawarah untuk mufakat dijadikan sendi untuk masyarakat.
5. Kesejahteraan bangsa menjadi tujuan bersama.

Tujuan daripada masyarakat dan negara kita tidak hanya bersifat negatif yaitu negara hanya memelihara ketertiban, tidak juga memelihara kepentingan warga negaranya, yang sama sekali diserahkan kepada usaha mereka sendiri atau sebaliknya semua kepentingan termasuk juga kepentingan perseorangan dipelihara oleh negara.⁹⁸ Untuk melaksanakan tugas negara dalam memelihara ketertiban dan perdamaian, keadilan, kesejahteraan, serta kebahagiaan umum, negara juga memelihara kebutuhan dan kepentingan warga

⁹⁷ Syahril Syarbani, *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h.26.

⁹⁸ Backy Krisnayuda, *Pancasila & Undang-Undang Realisasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.225.

negaranya perseorangan dengan menyelenggarakan bantuan hukum yang sebaik-baiknya.

Menurut Oemar Senoadji berpendapat bahwa negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia.⁹⁹ Karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, yang salah satu ciri pokoknya ialah adanya jaminan terhadap *Freedom of religion* atau kebebasan beragama dalam arti positif, dimana tidak ada tempat ateisme dan propaganda anti agama. Sedangkan menurut Senoadji ialah tidak ada pemisahan yang rigid dan mutlak antara agama dan negara.¹⁰⁰ Karena menurut Senoadji agama dan negara berada dalam hubungan yang harmonis.

Padmo Wahyono menelaah negara hukum Pancasila dengan bertitik pangkal dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam UUD-1945. Dalam asas kekeluargaan yang diutamakan adalah kepentingan rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai hal ini sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Dalam pasal ini yang dipentingkan adalah kepentingan orang banyak dan bukan kepentingan orang seorang. Padmo Wahyono beranggapan bahwa manusia dilahirkan dalam hubungannya atau keberadaannya dengan Tuhan.

Dalam konsep negara Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi negara Republik Indonesia yakni Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum, tentu saja memiliki konsekuensi yuridis yang harus dipertanggung jawabkan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ide dasar mengenai konsep negara hukum Indonesia sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam UUD 1945, tentu saja tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum dan jiwa bangsa Indonesia.¹⁰¹

⁹⁹ Muhammad Tahir Azhary, *Op.Cit.* h.93.

¹⁰⁰ Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit.* h.94.

¹⁰¹ Yopi Gunawan & Kristian, *Op.Cit.* h.82.

Menurut Bernard Arief Sidhartama menyatakan bahwa cita hukum bangsa Indonesia berakar dari Pancasila yang oleh bapak pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan sebagai landasan kefilosofan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana yang dirumuskan dalam UUD 1945. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pandangan hidup bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, serta hubungan manusia dengan alam semesta yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual didalam masyarakat dan alam semesta.

Idiologi di negara-negara lain memiliki perbedaan dengan Negara hukum Pancasila, didalam negara hukum Pancasila setiap warga negara dijamin kebebasannya untuk memilih salah satu agama yang diakui oleh pemerintah dan setiap orang harus beragama dan tidak diperbolehkan propaganda anti agama karena dalam falsafah negara Pancasila, agama dan penganut agama sangatlah dilindungi bahkan berusaha memasukan ajaran dan hukum agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejarah Indonesia juga menunjukan bahwa Pancasila merupakan pencerminan atau wadah yang mampu memelihara kebinekaan Indonesia. Walaupun Islam merupakan agama yang diikuti oleh mayoritas penduduk Indonesia bukan berarti seluruh aturan hukumnya bercirikan aturan Islam. Sebaliknya peraturan-peraturan, hukum negara, hukum agama dalam perundang-undangan sangata mengayomi keberagaman di Indonesia. Pernah ada usaha dari golongan-golongan tertentu untuk mengubah Indonesia menjadi Negara Islam. Tetapi tidak disetujui oleh para pendiri negara dikarenakan, apabila aturan hukum, atau negara kita diubah menjadi negara Islam tidak dapat menjadi pencerminan atau wadah Kebinekaan Indonesia.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh golongan sekuler (misalnya komunis) untuk mengubah Indonesia pun juga tidak berhasil. Makin jelas pula idiologi sekuler tidak mungkin dianut

oleh seluruh penduduk Indonesia, sehingga tidak mungkin idiologi sekuler menjadi pencerminan atau wadah kebinekaan Indonesia. Orientasi religius yang kuat tidak memungkinkan diterapkannya idiologi sekuler.¹⁰²

Hukum agama, sebagai unsur dan sebagai sistem hukum Pancasila dapat hidup berdampingan dengan hukum adat dan hukum barat sekalipun. Bahkan dari pengalaman pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan nasional, didapat gambaran bahwa ajaran-ajaran dan ketentuan-ketentuan hukum agama dapat dimanfaatkan untuk memperkaya khasanah hukum Nasional Indonesia.

Para pendiri bangsa Indonesia dengan sangat cemerlang mampu menyepakati pilihan yang pas tentang dasar negara sesuai dengan karakter bangsa, bersifat orisinal menjadi sebuah negara modern yang berkarakter religius, tidak sebagai negara sekuler tidak pula sebagai negara agama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep negara hukum yang dianut dan diterapkan di Indonesia bukanlah konsep negara hukum sebagaimana konsep *Rechtsstaat* di negara-negara yang menganut sistem hukum *civil Law* ataupun konsep *The Rule of Law* di negara-negara yang menganut sistem hukum *common Law*, melainkan menganut dan menerapkan konsep negara hukum yang sesuai dengan kondisi dan jiwa bangsa Indonesia yakni konsep negara hukum Pancasila.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Mahfud MD, menurutnya Indonesia tidak menganut konsep *Rechtsstaat* ataupun konsep *The rule of law*, melainkan membentuk suatu konsep negara hukum yang baru yaitu negara hukum Pancasila yang merupakan kristalisasi pandangan dan falsafah hidup yang syarat dengan nilai etika serta moral luhur bangsa Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 dan tersirat di dalam pasal-pasal UUD 1945.¹⁰³

¹⁰² HA Muin Umar, *Ummah Komunitas Religius, Sosial dan Politis Dalam Al-Quran* (Yogyakarta: Duta Wacana University Press & Mitra Gama Widya, 1990), h.237.

¹⁰³ Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 23.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Negara Hukum Pancasila adalah konsep negara hukum bukanlah sebagaimana konsep *Rechtsstaat* di negara-negara yang menganut sistem hukum *civil Law* ataupun konsep *The Rule of Law* di negara-negara yang menganut sistem hukum *common Law*, bukan pula negara Teokrasi melainkan menganut dan menerapkan konsep negara hukum yang sesuai dengan kondisi dan jiwa bangsa Indonesia yakni pancasila sebagai pandangan bernegara.

B. Dasar Hukum Pancasila Sebagai Dasar Negara

Dasar hukum Pancasila sebagai dasar hukum negara hukum Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan sejarah pembentukannya, yakni pada tanggal 1 Juni 1945 telah lahir di tangan Sukarno yang menjadi penggagas Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.¹⁰⁴ Bahwa rumusan Pancasila telah ada, sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatoken oleh Ir, Sukarno. Pancasila memerlukan proses yang panjang terhitung sejak tanggal 1 Juni 1945, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila.

Dasar falsafah Negara Republik Indonesia, Pancasila mempunyai hubungan erat dengan berbagai Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia dan beberapa Dokumen sejarah yang sekaligus juga merupakan/memberikan dasar hukum dan kekuatan berlakunya secara yuridis-konstitusional bagi Pancasila¹⁰⁵. Pancasila telah menjadi suatu norma yang mengikat yang artinya bahwa Pancasila merupakan acuan dalam tertib hukum Indonesia baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan bernegara.

Peraturan Perundangan negara yang menjadi dasar hukum Pancasila sebagai negara hukum Pancasila yaitu :

¹⁰⁴ Backy Krisnayuda, *Op.Cit.* h.40.

¹⁰⁵ CST Kansil, *Pancasila & Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Pradya Pramita,1999), h. 28.

1. Pembukaan Undang-undang Dasar 1945

Pada pembukaan UUD-1945 (Konstitusi Proklamasi) pada alinea ke-4 ditegaskan sebagai berikut:

“...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada:

- a. Kemanusiaan Yang Maha Esa
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
- c. Persatuan Indonesia
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kelima sila tersebut menurut Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 Naskah P-4 Bab II alinea Pertama, disebut Pancasila.

2. Batang Tubuh (Isi) Undang-Undang Dasar 1945

Apabila didalam pembukaan UUD-1945 Pancasila sebagai Dasar Filsafah negara dicantumkan dengan tegas dalam alinea yang ke-4, maka didalam Batang Tubuh atau Isi UUD-1945 Pancasila hanyalah dapat kita simpulkan dari ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal UUD-1945. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagai dasar falsafah negara.

Pancasila tersurat dalam pembukaan dan tersirat dalam UUD-1945, Pancasila menjiwai batang tubuh UUD-1945¹⁰⁶. Seluruh isi UUD 1945 dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar falsafah Republik Indonesia, masing-masing sila mempunyai pertalian bahkan menjiwai ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal UUD 1945. Adapun pasal-pasal dalam UUD-1945 yang menyimpulkan, mengandung dasar-dasar negara Pancasila antara lain yaitu:

- a. Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi “Negara berdasarkan atas ke Tuhanan Yang Maha Esa. (Ketentuan pasal ini sesuai dengan sila ketuhanan yang maha Esa).¹⁰⁷

¹⁰⁶ *Ibid.* h.29.

¹⁰⁷ Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945. h.36.

- b. Pasal 27 ayat (1) berbunyi “...segala warga-negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Ketentuan pasal ini sesuai dengan sila kedua.¹⁰⁸
- c. Pasal 27 ayat (2) berbunyi “...tiap-tiap warga-negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ketentuan pasal tersebut berhubungan dengan prikemanusiaan.¹⁰⁹
- d. Pasal 1 ayat (1) berbunyi “...Negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang berbentuk Republik.”¹¹⁰ Ketentuan pasal ini adalah sesuai dengan sila ke III.

3. Ketetapan-Ketetapan MPR

Dalam konsiderans Ketetapan MPRS ini ditegaskan, bahwa untuk terwujudnya kepastian dan keserasian hukum, serta kesatuan tafsiran dan pengertian Pancasila dan penegasan mengenai sumber tertib hukum dan tata peraturan perundangan Republik Indonesia. Isi dari ketetapan MPRS ini menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber Hukum¹¹¹.

Dijelaskan bahwa pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari Bangsa Indonesia dipadatkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan atas nama rakyat Indonesia, menjadi dasar Negara Indonesia. Dalam ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 ini ditegaskan bahwa “...Pembukaan UUD-1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci mengandung cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan yang memuat Pancasila sebagai dasar negara, merupakan satu rangkaian dengan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan oleh karena itu tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk MPR hasil pemilu.

¹⁰⁸ Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945. h.17.

¹⁰⁹ Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945, h.18.

¹¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945, h.3.

¹¹¹ CST Kansil, *Op.Cit.* h.30.

Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 ini telah dinyatakan berlaku dan perlu disempurnakan, berdasarkan ketetapan MPR No.V/MPR/1973 tentang tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang salah satunya berisi syarat yang harus dipenuhi oleh calon Presiden dan Wakil Presiden menurut Pasal 1 ketetapan MPR ini ialah setia kepada Cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila dan UUD-1945. Kemudian dikokohkan oleh Tap MPR No. I/MPR/1978 Pasal 115 yang berisi “Majelis berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadapnya serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekwen”.

Menegaskan bahwa Pancasila seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima sila. Kemudian ditegaskan kembali dalam Tap MPR, No. I/MPR/1983 (Pasal 104) bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945 (yang memuat Pancasila), tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadapnya serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekuen.

Kemudian ketetapan MPR No IV/MPR/1983 Pasal 1 yang berisi mencabut dan menyatakan tidak beraku lagi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1983 tentang Revrendum. Pecabutan Revrendum ini sendiri dikarenakan ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 telah melanggar Pasal 37 UUD 1945.

4. Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya

Adapun contoh Undang-undang dan peraturan Pelaksana dalam hal ini sebagai berikut¹¹²:

a. Undang-Undang No.4 tahun 1950 Tentang Pokok Pendidikan

Dalam Pasal 4 Undang-undang ini disebutkan “..Pendiidikan dan pengajaran berdasarkan asas-asas yang termaktub dalam Pancasila”.

¹¹² C.S.T. Kansil, *Op.Cit.* h.33.

- b. Undang-Undang No.22 Tahun 1961 Tentang Perguruan Tinggi
Dalam Pasal 9 ayat (2) menegaskan “..Pada Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta diberikan Pancasila Sebagai mata pelajaran”.
- c. Undang-Undang No.15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum
Dalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa “..Tujuan diadakannya Pemilihan Umum itu tidak hanya untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk menyusun negara baru dengan falsafah negara baru akan tetapi pemilihan umum itu adalah suatu alat yang penggunaannya harus menjamin tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya Undang-Undang Dasar 1945”.
- d. Undang-Undang No.8 Tahun 1974 Tentang Kepegawaian
Menurut Pasal 3 Undang-undang ini, pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD-1945, negara dan pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan.
- e. Undang-Undang No.3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya
1. Asas partai politik dan golongan karya adalah Pancasila dan UUD-1945
 2. Tujuan partai politik dan golongan karya antara lain menciptakan masyarakat yang adil dan makmur yang merata spiritual dan materil berdasarkan Pancasila dan UUD-1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengembangkan kehidupan Demokrasi Pancasila,
 3. Partai politik dan golongan karya dilarang menganut, mengembangkan dan menyebarkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Lenisme serta faham atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD-1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya.

4. Partai Politik dan Golongan Karya berkewajiban antara lain melaksanakan, mengamalkan dan mengamankan Pancasila serta UUD-1945.

C. Unsur-Unsur Negara Hukum Pancasila

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.”¹¹³ adapun ciri-ciri Indonesia sebagai Negara Republik antara lain:

1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus pemerintahan (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945)
2. Presiden dipilih oleh rakyat (Pasal 6A ayat (1) UUD 1945)
3. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dibatasi maksimal dua periode (Pasal 7 UUD 1945).

Indonesia sebagai negara kesatuan hanya memiliki satu konstitusi/UUD yakni UUD 1945 dan satu Kepala Negara yang bertugas sebagai kepala negara sekaligus pemerintahan yang memegang kekuasaan Eksekutif dan dibantu seorang Wakil Presiden dan menteri-mentri dalam kabinet. Sebagai negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat, Indonesia memberikan kebebasan, kemerdekaan bagi setiap rakyatnya dalam memenuhi hak-hak asasi manusianya seperti hak dalam kebebasan berpendapat, hak kemerdekaan untuk menganut keyakinan politik, hak untuk diperlakukan sama di depan hukum dan masih banyak lagi.

Negara Hukum Pancasila adalah suatu negara hukum yang bercirikan atau berlandaskan pada nilai-nilai serta berdasarkan pada identitas dan karakteristik yang terdapat dalam Pancasila. Identitas dan karakteristik yang terdapat dalam negara Hukum Pancasila, yaitu ketuhanan, kekeluargaan, gotong royong dan kerukunan.¹¹⁴ Dalam hal ketuhanan, negara Hukum Pancasila mengakui adanya keberadaan dan

¹¹³Undang-undang Dasar Republik Indonesia, h.3.

¹¹⁴ Teguh Prasetyo & Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila* (Bandung: Nusa Media, 2014), h.48.

kemahakuasaan Tuhan. Pengakuan tersebut sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945.

Dalam pembukaan UUD 1945 negara Indonesia mengakui bahwa Negara Indonesia lahir karena adanya campur tangan dan kemahakuasaan Tuhan. Sifat kekeluargaan dan gotong royong merupakan suatu kegiatan sosial yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dari zaman dahulu kala hingga saat ini, rasa kebersamaan ini munculah sikap sosial tanpa pamrih dari masing-masing individu masyarakat Indonesia yang kemudian diangkat kedalam nilai-nilai Pancasila.

Pancasila sebagai ideologi terbuka merupakan sistem yang sangat cocok dengan bangsa Indonesia, yang bersifat universal berkaitan dengan asas kemanusiaan pada umumnya.¹¹⁵ Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan merupakan kata inti yang menunjukkan suatu yang luas, tidak terikat ruang, waktu, lingkungan, kelompok maupun jumlah. Pancasila sebagai pendoman isi UUD 1945, UUD 1945 hanya memuat aturan pokok, garis-garis besar sebagai intruksi kepada pemerintah pusat untuk menyelenggarakan kehidupan negara. UUD 1945 yang mengikat itu sangat menguntungkan bagi negara Indonesia yang masih dapat berkembang secara dinamis, sehingga dengan aturan-aturan pokok itu bersifat terbuka, luwes dan fleksibel yang memudahkan dalam membuat, mengubah dan mencabutnya sewaktu-waktu diperlukan.

Pancasila memberikan orientasi ke depan dan selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapi dan akan dihadapi di era keterbukaan/globalisasi dalam segala bidang. Keterbukaan ideologi Pancasila terutama ditunjukkan dalam penerapannya yang berbentuk pola pikir yang dinamis dan konseptual dalam dunia modern.¹¹⁶ Keterbukaan ideologi Pancasila disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, mengikuti perkembangan zaman. Tidak menuntut

¹¹⁵ Slamet Sutrisno, *Filsafat Dan Ideologi Pancasila* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2006), h. 137.

¹¹⁶ Syahril Syarbani, *Op.Cit.* h.58.

kemungkinan untuk mengikuti perkembangan seperti di negara lain, akan tetapi tetap terarah sesuai dengan aturan agama dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat.

Nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam norma-norma atau norma dasar yang terkandung dalam Pancasila yang terkandung dan tercermin dalam pembukaan UUD 1945. Nilai atau norma dasar yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 ini yang tidak boleh berubah. Perwujudan atau pelaksanaan nilai-nilai instrumental dan nilai-nilai peraktis harus tetap mengandung jiwa dan semangat yang sama dengan nilai dasarnya. Keberadaan Indonesia sebagai Negara hukum tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum dan jiwa bangsa Indonesia.

Berkaitan dengan negara hukum Indonesia menurut Oemar Seno Adji beranggapan bahwa negara hukum Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut¹¹⁷:

1. Adanya jaminan kebebasan beragama (*freedom of religion*) artinya dalam hal ini Indonesia dalam hal memberikan kebebasan beragama bagi rakyatnya dalam arti konotasi positif yakni tidak ada tempat bagi ateisme dan propaganda anti agama. Semua rakyat Indonesia harus memiliki agama.
2. Tidak ada pemisahan yang *rigid* dan mutlak antara agama dengan Negara artinya Indonesia sebagai Negara hukum sekaligus Negara yang tidak anti agama, Indonesia memiliki ciri khusus dari hak asasi yang tidak memisahkan agama dengan Negara.

Padmo Wahyono menelaah negara hukum Pancasila dengan bertitik pangkal dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam UUD 1945.¹¹⁸ Hal ini tercermin dalam Pasal 33 UUD, dalam pasal ini yang terpenting adalah kepentingan masyarakat banyak dari pada kepentingan orang seorang. Sehubungan

¹¹⁷ Yopi Gunawan & Kristian, *Op.Cit.* h. 97.

¹¹⁸ Muhammad Tahir Azhary, *Op.Cit.* h.94.

dengan fungsi hukum, padmo menegaskan bahwa fungsi hukum untuk menegakkan demokrasi sesuai dengan tujuh pokok sistem pemerintahan negara dalam penjelasan UUD 1945, mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, dan menegakkan prikemanusiaan yang didasarkan kepada ketuhanan yang maha Esa dan dilaksanakan secara adil dan beradab.

Menurut Tahir Azhari sebagaimana telah dibicarakan diatas maka perlu ditambahkan satu asas lagi yakni asas kerukunan, dimana asas ini mencerminkan satu persatuan dan kesatuan dengan semangat kekeluargaan dan kerukunan hidup di Indonesia. Dengan mengemukakan pandangan dari dua pakar yakni Oemar Senoadji dan Padmo wahyono, maka Muhammad Tahir Azhari berpendapat bahwa negara hukum Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut¹¹⁹:

1. Ada hubungan erat antara agama dan Negara.
2. Bertumpu pada sila ketuhanan yang maha Esa.
3. Kebebasan Bergama dalam arti Positif.
4. Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang
5. Adanya asas kekeluargaan dan kerukunan.

Sedangkan Bernard Arief Sidharta mengatakan bahwa ciri-ciri negara hukum Pancasila adalah sebagai berikut¹²⁰:

1. Negara hukum

Dalam hal negara hukum Pancasila, pemerintahan yang dikehendaki haruslah berdasarkan pada dan oleh hukum (*rule of law dan rule by law*). Adapun ciri-ciri Indonesia sebagai Negara hukum antara lain:

- a. Adanya jaminan perlindungan HAM (Pasal 27- Pasal 31 UUD 1945).
- b. Kekuasaan kehakiman/peradilan yang merdeka tanpa intervensi (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945)
- c. Asas legalitas yang artinya baik pemerintah maupun warga negaranya dalam bertindak harus berdasarkan hukum

¹¹⁹ Muhammad Tahir Azhary, *Op.Cit.*h.97.

¹²⁰ Yopi Gunawan & Kristian. *Ibid*, h.98.

d. Persamaan di hadapan hukum yakni (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945)

2. Negara demokrasi

Keseluruhan kegiatan bernegaranya, selalu terbuka bagi partisipasi seluruh masyarakat, yang didalamnya pelaksanaan kewenangan dan penggunaan kekuasaan publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan harus selalu terbuka bagi pengkajian rasional oleh semua pihak Dalam kerangka tata nilai dan tata hukum yang berlaku.

Kegiatan partisipasi masyarakat ini diwujudkan dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Badan Eksekutif diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh rakyat atau melalui badan legislatif, adapun kegiatan pemilu ini diatur dalam BAB VIIB Pasal 22 E UUD 1945.

3. Organisasi seluruh rakyat

Segegap rakyat menata diri secara rasional untuk berada dalam kebersamaan ikhtiar, dalam kerangka dan melalui tatanan kaidah hukum yang berlaku, mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat dengan selalu mengacu pada nilai-nilai martabat manusia dan ketuhanan yang maha Esa.

Dengan mengacu pada ciri diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa negara hukum Pancasila adalah negara hukum yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya supremasi hukum adanya pemerintah berdasarkan hukum
2. Adanya pemerintahan berdasarkan hukum
3. Demokrasi
4. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia
5. Kekuasaan hakim yang bebas tanpa intervensi
6. Adanya sarana kontrol hukum bagi tindakan-tindakan pemerintah
7. Hukum bertujuan untuk mensejahterakan dan keadilan sosial warga masyarakat
8. Berdasarkan asas ketuhanan yang maha Esa
- 9.



BAB IV

KONSEP NEGARA HUKUM PANCASILA DITINJAU DARI PRINSIP-PRINSIP BERNegara DALAM FIQH SIYASAH

A. Konsep Negara Hukum Pancasila

Konsep negara hukum Indonesia terdiri dari beberapa prinsip yakni

1. Prinsip supremasi hukum

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai negara hukum Indonesia sangatlah menjunjung tinggi hukum (prinsip supremasi hukum). Eksistensi hukum di Indonesia pada hakikatnya mengatur hubungan hukum dalam pergaulan masyarakat, baik antara orang seorang, orang yang satu dengan orang lain, antara orang dengan lembaga negara dan mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang ada pada Undang-Undang.

Negara dalam melaksanakan pemerintahan secara keseluruhan, maka sangat penting untuk melakukan pengawasan dan pembatasan terkait pelaksanaan hukum. Indonesia sebagai negara yang menegakkan supremasi hukum dalam upaya memberikan jaminan terciptanya keadilan. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintah wajib menjunjung tinggi hukum dengan tidak ada kecualinya hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) fungsi hukum itu sendiri dalam negara hukum Indonesia bukan hanya diperuntukan kepada rakyat akan tetapi juga diperuntukan untuk seluruh masyarakat Indonesia terutama untuk penegak hukum.

2. Prinsip pemerintahan berdasarkan hukum

Adanya prinsip pemerintahan berdasarkan hukum artinya setiap tindak tanduk pemerintah tidak boleh menyalahi tata peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal kekuasaan pemerintahan Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat

(3) UUD 1945 tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas). Sebagai negara yang berbentuk kesatuan yang berbentuk Republik (Pasal 1 ayat 1) maka Presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan (Pasal 4 ayat 1) masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dibatasi hanya dua kali periode masa jabatan apabila dipilih kembali.

Oprasionalisasi dari konsep negara hukum Indonesia dituangkan dalam konstitusi negara, yaitu UUD 1945 merupakan hukum dasar negara yang menempati posisi sebagai hukum negara tertinggi dalam tertib hukum Indonesia (*legal order*) Indonesia. Legal order merupakan satu kesatuan sistem hukum yang tersusun secara tertib di Indonesia yang dituangkan dalam ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-perundangan.

Sumber hukum Indonesia terdiri dari sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945. Adapun tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sebagai berikut:

1. UUD 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
3. Undang-undang
4. Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah

UUD 1945 sebagai naskah keseluruhan terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, Penjelasan sebagai hukum dasar negara. UUD 1945 hanya memuat aturan-aturan pokoknya saja, sedangkan peraturan lebih lanjut dibuat oleh orga negara, sesuai dengan dinamika pembangunan dan perkembangan serta kebutuhan masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum yang menerapkan prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi) dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945 yaitu dasar

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945”.

3. Prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi)

Prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi) di Indonesia diwujudkan dalam Pemilu langsung baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Eksekutif. Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Undang-Undang No.42 Tahun 2008 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

4. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM

Prinsip kedaulatan rakyat juga merupakan salah satu landasan hukum pengakuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Dalam prinsip tersebut hukum dijadikan instrument penegakan HAM yang digunakan sebagai ukuran bagaimana demokrasi dilaksanakan. Prinsip demokrasi dan prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia menjamin peran serta masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan Perundang-Undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Sesuai dengan konsep perlindungan dan pengakuan terhadap HAM yakni penghormatan sebagai insan manusia, dalam suatu negara warga negara dan individu manusia yang memiliki hak. Hak itu termasuk hak didengarkan suara melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jadi perasaan keadilan masyarakat didengarkan dan prinsip demokrasi mejebatani dan sebagai wadah HAM. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dibentuklah Komnas HAM yang bersifat independen sebagai wujud jaminan pelaksanaan dan perlindungan HAM di Indonesia.

5. Prinsip kekuasaan hakim yang bebas tanpa intervensi

Prinsip kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, terlepas dari pengaruh

kekuasaan pemerintah, seperti yang dikehendaki Pasal 24 UUD 1945. Adapun implementasi Pasal 24 B UUD 1945 yaitu diundangkan Undang-undang No.22 Tahun 2004, tentang Komisi Yudisial yang mempunyai peran penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan hakim yang merdeka melalui pencalonan hakim agung. Serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan dan mengangkat hakim agung kepada DPR, dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim.

Dari rincian fungsi komisi Yudisial tersebut dapat dilihat hubungan antara lembaga legislatif, eksekutif dan lembaga yudikatif dikembangkan secara seimbang melalui mekanisme *Checks and balance*, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan antara lembaga negara.

6. Prinsip adanya sarana kontrol bagi tindakan-tindakan pemerintah

Prinsip adanya sarana kontrol di Indonesia ini diwujudkan dalam bentuk Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang merupakan peradilan administrasi yang berwenang untuk menilai keabsahan suatu keputusan Tata Usaha Negara dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilakukan pemerintah. Peradilan Tata Usaha Negara merupakan wujud kontrol pemerintah sebagai sarana untuk mencegah timbulnya segala suatu bentuk tindakan penyimpangan tugas pemerintahan yang dilakukan dari pada apa yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan. Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara diartikan sebagai kecenderungan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi warga negara terhadap kekuasaan pemerintah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, memberi pengayoman, sarana pemelihara ketertiban dan stabilitas hukum.

7. Hukum bertujuan untuk menegakkan dan keadilan sosial

Rumusan singkat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, negara Indonesia bercita-cita mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

8. Berpendoman pada sila pertama yakni ketuhanan yang maha Esa.

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara dan pendoman hukum, maka dalam hal ini Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hukum dan berpendoman pada sila pertama yakni sila ketuhanan yang maha Esa, merupakan negara yang menjamin dan melindungi setiap penduduk Indonesia untuk memeluk agama sesuai keyakinan dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Kebebasan dalam memeluk agama dalam hal ini berkonotasi positif, artinya setiap warga negara Indonesia diwajibkan beragama. Tidak diperbolehkan ateis apalagi propaganda anti agama. Hormat menghormati serta berkerjasama antar pemeluk agama agar tercipta kerukunan hidup, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Dalam hal ini Indonesia sebagai negara yang berpendoman sila pertama menjadikan Indonesia berkarakter relegius, Indonesia bukan termasuk negara teokrasi yang menjadikan salah satu agama sebagai pendoman beregaranya, tetapi dalam hal ini Indonesia tidak memisahkan kehidupan negara dan agama, hukum-hukum agama dijadikan pendoman moral dalam bernegara malah hukum agama memperkaya khasanah hukum Indonesia.

B. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Negara Hukum Pancasila

Prinsip supremasi dalam negara hukum Pancasila memiliki persamaan dengan prinsip persamaan. Pasal 1 ayat (3) merupakan wujud Indonesia sebagai negara yang menegakkan supremasi hukum dalam upaya memberikan jaminan terciptanya keadilan. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintah wajib menjunjung tinggi hukum dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 UUD 1945). Rumusan ini mengandung pengertian bahwa semua warga negara Republik Indonesia memiliki persamaan hukum dan hak yang sama dihadapan pemerintah. Dalam hal ini di Indonesia tidak boleh ada perlakuan diskriminasi terhadap warga negara. Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Hujarat ayat 13

قَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَكُمْ وَأُنْتَى ذَكَرٍ مِّنْ خَلَقْنَاهُ إِنَّا الْنَّاسُ يَأْثُهَا

حَبِيرٌ عَلِيمٌ اللَّهُ إِنَّا تَقْدِكُمْ اللَّهُ عِنْدَ أَكْرَمَكُمْ إِنَّا لَتَعَارِفُواو

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat diatas menceritakan bagaimana manusia tercipta dari pasangan laki-laki dan wanita yakni adam dan hawa dan dilanjutkan oleh pasangan yang lainnya melalui suatu proses perkawinan ayah dan ibu. Proses penciptaan yang seragam itu merupakan suatu kriterium bahwa pada dasarnya semua manusia itu adalah sama. Prinsip persamaan ini salah satu tiang utama dalam membangun negara hukum menurut Al-Qur'an dan Sunnah.

Ukuran ketinggian derajat manusia dalam pandangan Islam bukan ditentukan oleh nenek moyangnya, kebangsaannya, warna kulit, jenis kelamin dan lain sebagainya yang berbau realisasi. Kualitas dan ketinggian derajat seseorang ditentukan oleh ketakwaan yang ditunjukkan dengan prestasi kerjanya yang bermanfaat bagi manusia, maka atas ukuran ini, maka dalam Islam semua orang memiliki kesempatan yang sama. Prinsip persamaan dalam Islam mencakup bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain.

Prinsip pemerintahan berdasarkan hukum sesuai dengan prinsip keadilan. Prinsip pemerintahan berdasarkan hukum artinya setiap tindak tanduk pemerintah tidak boleh menyalahi tata peraturan Perundang-Undangan. Sebagaimana yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 135

مُسْكُم عَلَى وَلَوْ لَهِ شُهَدَاءُ بِالْقِسْطِ قَوْمِينَ كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
لَا يَهْمَا أُولَى فَاللَّهُ فَقِيرًا أَوْ غَنِيًّا يَكْفُ. إِنَّ وَالْأَقْرَبِينَ أَلْوَالِدِينَ أَوْ أَنْف
لُونِ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنْ تُعْرِضُوا أَوْ تَلُودُوا أَوْ أَنْ تَعْدِلُوا أَنْ أَهْوَى تَتَّبِعُوا فِ
خَيْرَاتِهِ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Kandungan ayat diatas berisi perintah kewajiban menegakkan keadilan bagi setiap manusia di bumi, terutama bagi orang-orang yang beriman, Setiap mukmin yang menjadi saksi diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya berlaku bagi semua lapisan masyarakat baik Muslim maupun non-Muslim, manusia dilarang mengikuti hawa nafsu dan manusia dilarang menyelewengkan kebenaran.

Kekuasaan pemerintahan Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas). Sebagai negara yang berbentuk kesatuan yang berbentuk Republik (Pasal 1 ayat 1) maka Presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan (Pasal 4 ayat 1) masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dibatasi hanya dua kali periode masa jabatan apabila dipilih kembali.

Operasionalisasi dari konsep negara hukum Indonesia dituangkan dalam konstitusi negara, yaitu UUD 1945 merupakan hukum dasar negara yang menempati posisi sebagai hukum negara tertinggi dalam tertib hukum Indonesia (*legal order*) Indonesia. tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum, tidak boleh sewenang-wenang, yang bertujuan untuk melindungi seluruh lapisan rakyat dari intervensi oleh dan dari pihak manapun termasuk penyelenggara Negara dengan kata lain tujuan dari prinsip ini adalah untuk menegakkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Prinsip keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan amanah rakyat yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan roda pemerintahan yang diberikan rakyat kepada pemimpin yang didalamnya mengandung nilai-nilai kontrak sosial dan juga Indonesia sebagai negara yang berpegang teguh pada prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi) yang artinya setiap keputusan pemerintah dari dan ditunjukkan untuk kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan prinsip kekuasaan sebagai amanah yang terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58

سَاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنِ تَتَوَدُّوْنَ أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ
يُرَاسِيْعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعْظُمُ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ أَلَد



Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi) ini juga sesuai dengan prinsip musyawarah dalam konsep negara hukum menurut fiqh siyasah. Demokrasi di wujudkan dalam pemilu, dan hak untuk mengungkapkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan karena Indonesia menjamin peran serta masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan masyarakat sebagai wujud perlindungan dan pengakuan terhadap HAM.

Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM dalam negara hukum Indonesia juga sesuai dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM dalam konsep negara hukum menurut fiqh siyasah yakni terdapat dalam surah Al-Isra ayat 70

سَتَمِّنْ وَرَزَقْنَهُمْ وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي وَحْمَلْنَهُمْ أَدَمَ بَنِي كَرَمًا وَلَقَدْ
تَفْضِيلًا خَلَقْنَا مِمَّنْ كَثِيرٌ عَلَى وَفَضَّلْنَاهُمْ الطَّيِّبِ

Artinya: dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan[862], Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Ayat tersebut mengekspresikan kemuliaan manusia dalam Al-Qur'an dengan istilah karamah (*kemuliaan*). Menurut Mohammad Hasbi Ash-Shiddieqy membagi karamah itu menjadi tiga kategori yaitu (1) kemuliaan pribadi atau karamah *fardiyah* yang artinya dilindungi pribadinya maupun hartanya, (2) kemuliaan atau *karomah ijtimaiyah* yang artinya persamaan dijamin sepenuhnya dan (3) kemuliaan politik atau *karomah siyazah* yang artinya Islam meletakkan hak-hak politik dan menjamin hak-hak itu sepenuh bagi setiap orang warga negara, karena kedudukannya yang dalam Al-Quran disebut sebagai Khalifah.

Prinsip peradilan bebas tanpa intervensi dalam negara hukum Pancasila sesuai dengan prinsip peradilan bebas yang terdapat dalam negara hukum menurut fiqih siyazah yakni terdapat dalam surah An-Nisa ayat 58

أَسِيبِينَ حَكَمْتُمْ وَإِذَا أَهْلُهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تَوَدُّوْنَ أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ
يُرَاسِمِعَا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعْطُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ أَلَد



Artinya:.. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Kandungan ayat tersebut berisi bahwa faqih yang adil mampu untuk menengahi perselisihan-perselisihan dan memutuskan perkara-perkara hukum. Para penganut Immamiah percaya bahwa fungsi ini (*wilayat al-qada atau al-hukuma*) termasuk dalam otoritas illahiah seorang imam atau pemimpin, maka dalam hal ini sangat penting untuk melakukan pengujian dan penyeleksian seorang yang akan menjadi hakim, agar kelak mereka dapat bertindak adil dalam menangani perkara hukum.

Bentuk pengujian dan penyeleksian seorang yang akan menjadi hakim tidak lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, seperti yang dikehendaki Pasal 24 UUD 1945. Adapun implementasi Pasal 24 B UUD 1945 yaitu diundangkan Undang-undang No.22 Tahun 2004, tentang Komisi Yudisial yang mempunyai peran penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan hakim yang merdeka melalui pencalonan hakim agung. Serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan dan mengangkat hakim agung kepada DPR, dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim.

Rincian fungsi komisi Yudisial tersebut dapat dilihat hubungan antara lembaga legislatif, eksekutif dan lembaga yudikatif dikembangkan secara seimbang melalui mekanisme *Checks and balance*, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan antara lembaga negara. Prinsip adanya sarana kontrol bagi tindakan pemerintah dalam negara hukum Pancasila sesuai dengan prinsip pengakuan dan perlindungan HAM dalam konsep negara hukum menurut fiqh siyasah.

Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara diartikan sebagai kecendrungan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi warga negara terhadap kekuasaan pemerintah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, memberi pengayoman, sarana pemelihara ketertiban dan stabilitas hukum. Dalam rumusan singkat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,

negara Indonesia sebagai negara hukum bercita-cita mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Tujuan hukum negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Tujuan hukum dalam bernegara Indonesia dalam hal ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip bernegara dalam fiqh siyasah antara lain:

1. Prinsip kesejahteraan.

Fungsi negara bukan hanya mencakup kebutuhan materil saja, kewajiban Negara juga mencakup pemenuhan kebutuhan spiritual, hal ini bertujuan mencegah penimbunan harta seseorang atau sekelompok orang. Dalam Islam prinsip kesejahteraan diwujudkan melalui pentingnya zakat dalam negara hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103

لَوْ تَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ وَصَلَّيْنَا بِهَا وَتَرَكْنَاهُمْ تَطْهَرُوا لَهُمْ صَدَقَاتُ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهُمْ سَكَنٌ ۝

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doakamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

2. Prinsip perdamaian

Indonesia menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi hal ini sesuai dengan pernyataan yang tercantum dalam UUD 1945 alinea I karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan pri keadilan. Al-Quran dengan tegas menyeru kepada orang-orang yang beriman agar masuk

kedalam perdamaian. Nomokrasi Islam harus ditegakkan dengan prinsip perdamaian. Hubungan dengan Negara-negara lain harus dijalin dan berpegang pada prinsip perdamaian dan keadilan sosial.

3. Prinsip keadilan

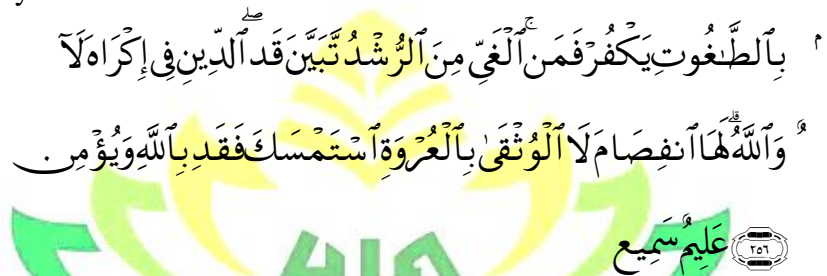
سُكْمٌ عَلَىٰ وَلَوْلَ اللَّهِ شُهَدَاءُ بِالْقِسْطِ قَوْمٌ مِّنْ كُفُوَاءِ أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهِمْ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاللَّهُ فَقِيرٌ أَوْ غَنِيٌّ يَكُنْ. إِنَّ وَالْأَقْرَبِينَ الْوَالِدِينَ أَوْ أَنْفِ
وَنَبِمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنَّ تُعْرَضُوا أَوْ تَلُورُوا أَوْ تَعْدِلُوا أَنَّ أَهْلَىٰ تَتَّبِعُوا
خَيْرًا تَعْمَلًا

Artiya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan

Indonesia juga berpendoman pada asas, dari sila pertama dari Pancasila Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni ketuhanan yang maha Esa, bertujuan mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa. Dalam asas ini mengandung pengertian bahwa adanya jaminan terhadap kebebasan beragama sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) yakni “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya. Kebebasan dalam beragama ini berkonotasi positif, yakni semua masyarakat Indonesia harus memiliki agama dan ateis dilarang serta tidak boleh propaganda anti agama.

Salah satu ciri khas lain dengan berlandaskan asas ini Indonesia tidak memiliki pemisah yang *Rigid* dan mutlak antara agama dan negara. Walaupun Indonesia bukan termasuk Negara Teokrasi, tetapi Indonesia tidak anti agama, malah sebaliknya hukum agama sangat mengayomi keberagaman hukum-hukum yang ada di Indonesia, karena hukum agama dijadikan pendoman moral dalam kehidupan bernegara.

Dilihat dari sudut Fiqih Siyasah, sila pertama “Ketuhannan yang maha Esa” dapat dipahami identik dengan tauhid yang merupakan inti dari ajaran Islam. Dalam ajaran Islam diberikan toleransi, kebebasan dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pemeluk ajaran agama mereka masing-masing. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256



Artinya: *tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Negara Indonesia bukanlah negara sekuler dan bukan pula negara agama (negara teokrasi). Prinsip yang terkandung dalam sila pertama itu ialah mengakui adanya kekuatan gaib yang ada diluar diri manusia sebagai pencipta serta pengatur alam semesta.

Sebagai negara yang berpenduduk terbanyak yang beragama Islam. Indonesia adalah suatu negara nasional yang memiliki dasar dan falsafah Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Objek kajian Fiqih siyasah meliputi pengaturan yang berkaitan dengan hubungan antara warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat interen maupun hubungan yang bersifat eksteren antara negara, dalam berbagai bidang kehidupan.

Ditinjau dari segi aspek (bentuk pemerintahan) maka berdasarkan pembagian negara hukum menurut Ibnu Kaldun maka dalam hal ini penulis beranggapan bahwa Indonesia tergolong kedalam jenis negara yang berdasarkan nalar (*siyasah aqliyah*). Sama halnya dengan UUD 1945 sebagai hukum tertulis yang sah dibuat atas kesepakatan para cendekiawan dengan proses yang panjang yakni antara lain Ir Sukarno, Drs Moh Hatta, Mr.A Subarjo, Mr A A Maramis, Wachid Hasyim, Abikusno Tjokrosujoso, H Agus salim, Mr Muh Yamin, Prof Suepomo, Abdoel Kahar Moezakir dan masih banyak lagi. Tetapi penulis tidak sependapa dalam hal pendapat Farabi yang mengatakan bahwa dalam pemerintahan *siyasah aqliyah* tidak mengindahkan wahyu sebagai hukum yang dalam hal ini berarti adanya pemisah antara agama dan negara hal ini berbeda dengan kondisi hukum yang ada di Indonesia.

Pemerintahan Indonesia sebagai negara yang menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup dalam bernegara, dan menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia, yang mana sila pertama sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengandung arti bahwa Indonesia mengakui adanya kekuatan gaib yang ada diluar diri manusia sebagai pencipta serta pengatur serta penguasa alam semesta. Menjamin penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaan masing-masing, melarang segala bentuk tindakan ateisme dan propaganda anti agama.

Indonesia bukan tergolong negara teokrasi, karena Indonesia tidak memiliki pemisah yang *rigid* antara agama dan negara. Nilai-nilai hukum yang terkandung dalam ajaran agama sebagian dijadikan acuan dalam pembuatan hukum. Asas-asas hukum Islam dapat ditransformasikan kedalam berbagai peraturan perundang-undangan tanpa menggunakan label hukum Islam, tetapi diserap kedalam hukum nasional. Contoh kontribusi hukum Islam dalam perundang-undangan Indonesia yaitu Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peradilan agama yang merupakan salah satu perwujudan pranata politik Islam dalam struktur kekuasaan Negara Republik Indonesia.

Berkaitan dengan penggolongan negara menurut pemikiran Al-Farabi tentang negara, penulis berpendapat bahwa apa bila melihat pembagian macam-macam negara hukum menurut Farabi maka tidak ada satupun negara menurut Farabi yang secara menyeluruh menggambarkan kondisi di Indonesia, tetapi untuk menganalisisnya dalam hal ini penulis mengambil salah satu aspek yang terdapat persamaannya dengan konsep negara hukum Pancasila. Diantara pembagian negara menurut Farabi tersebut hanya negara utama atau negara bahagia (*al-madinah al-fadilah*) yang salah satu aspeknya menggambarkan Indonesia. Pendapatnya Farabi yang mengatakan bahwa negara yang bahagia itu digambarkan sebagai organ tubuh yang utuh dan sehat dimana semua organ dan anggota badan saling berkerja bersama dengan tugas masing-masing demi kesempurnaan tubuh dan penjagaan kesehatannya.

Penulis berpendapat bahwa kondisi pemerintahan Indonesia dalam hal ini memiliki persamaan, karena dalam negara hukum Pancasila organ tubuh yang digambarkan oleh Farabi juga terdapat dalam negara hukum Pancasila. Di Indonesia organ tersebut digambarkan dalam bentuk lembaga pemerintahan, seperti lembaga Eksekutif yang

bertugas menjalankan Undang-Undang dalam hal ini yang bertindak sebagai pelaksananya adalah Presiden dan menteri-mentri. Adapun Presiden sebagai organ pokok dalam menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan menteri-mentrinya digambarkan sebagai organ yang bertugas membantu dan melayani organ utama yakni jantung (Presiden)

Lembaga legislatif yang bertugas membuat dan merumuskan Undang-Undang. Peran ini dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan lembaga Yudikatif sebagai lembaga yang bertugas mengawal, mengawasi dan memantau proses berjalannya Undang-undang dan penegakkan hukum di Indonesia. Adapun fungsi ini dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Yudisial (KY). Kedua lembaga inilah yang berfungsi sebagai organ pendukung.

Penulis dalam hal ini tidak sependapat dengan pemikiran Farabi yang diwarnai oleh pandangan Plato, dalam hal ini seakan Farabi mengatakan bahwa Tuhan telah menciptakan tiga macam manusia, macam terbaik terbuat dari emas, macam yang kedua terbuat dari perak, macam yang ketiga terbuat dari kuningan dan besi yang secara reflektif Farabi telah membagi warga negaranya berdasarkan tingkat-tingkatan tertentu, menurutnya bahwa masyarakat disuatu negara ada yang berkemampuan rendah sementara ada yang dianggap berkemampuan tinggi dan yang memiliki kemampuan tinggi, disini Farabi ingin mengungkapkan bahwa masyarakat yang berkemampuan tinggi tentunya akan lebih bahagia dan lebih dihormati sementara yang berkemampuan rendah cenderung kurang bahagia dan juga kurang dihormati.

Fungsi organ atau lembaga-lembaga pemerintahan dalam negara hukum.

Pancasila sangat berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Farabi tentang pembagian masyarakat.

Indonesia sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), pengaturan tentang HAM terdapat dalam UUD 1945 dari Pasal 27-34, Fungsi organ atau lembaga-lembaga pemerintahan berkaitan dengan sila ke empat yang berfungsi sebagai penjaga, dalam menjalankan roda pemerintahan harus mengutamakan kemaslahtan masyarakat, kesamaan derajat didepan hukum, menjadikan musyawarah sebagai sistem dalam mengambil keputusan bersama, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain yang dalam hal ini juga melindungi hak asasi manusia setiap individu.

Pendapat Farabi tentang pembagian masyarakat menurut penulis dalam tingkatan ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial dalam sistem politik, kepala negara dan kepala pemerintahan (khalifah) harus diikuti dan dihormati secara mutlak tanpa terkecuali, maka khalifah harus terpilih dari orang yang memenuhi 12 syarat atau kriteria. Kerangka pemikiran politik semacam itu nampaknya terlalu membuka peluang untuk terjadinya diktatorian, feodalisme dan otoriterian seorang pemimpin, dan pemimpin menjadi tidak boleh dikritik serta menjadi kebal hukum.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 bahwa "Negara Indonesia adalah Negara kesatuan, yang berbentuk Republik". Negara kesatuan artinya Indonesia adalah Negara yang berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, dimana pemerintahan pusat adalah sebagai kekuasaan tertinggi yang menjadi pusat atas jajaran pemerintahan daerah dibawahnya, karena di Indonesia tidak ada negara dalam negara, dan dilaksanakan berdasarkan sistem desentralisasi.

Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik, yang artinya kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat sebagai wujud negara hukum yang berlandaskan asas demokrasi. Karena di Indonesia sendiri bukanlah Negara Monarki yang mengangkat kepala negara harus berdasarkan keturunan Raja (bangsawan). Berdasarkan Pasal 6 A ayat (1) menyatakan bahwa "presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh

rakyat". Di Indonesia seorang kepala negara dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (Pemilu).

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan". Artinya kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden dibatasi hanya lima tahun dalam satu kali masa jabatan, dan atau dua kali periode masa jabatan apabila dipilih kembali.

Adapun Islam tidak menentukan pemerintahan itu harus seperti apa, yang terpenting asas-asas, prinsip-prinsip bernegaraanya harus sesuai dengan syariat dan mendahulukan kemaslahatan umat. Menurut penulis membentuk negara itu sangatlah penting. Dengan adanya negara maka *Maqashidu Syariah* (Tujuan Syariah) dapat terpenuhi seperti *hifzul din* (memelihara agama), *hifzun nafsi* (memelihara jiwa), *hifzun aql* (memelihara akal), *hifzun nasb* (menjaga keturunan), *hifzun mal* (menjaga harta) supaya terjamin keberadaannya. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa pemerintahan yang adil dalam suatu negara tentu akan memperhatikan hal-hal tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis berkesimpulan bahwa ditinjau dari kedudukan Negara Hukum Pancasila berdasarkan prinsip-prinsip bernegara dalam Fiqih Siyasah, maka konsep pemerintahan Indonesia adalah sah dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunah. Antara konsep Negara hukum pancasila dan konsep Negara hukum menurut fiqih siyasah memiliki banyak persamaan dalam prinsip bernegaraanya. Keabsahan ini bukan hanya dilihat dari sistem pemilihan dan mekanisme pelantikan presidennya saja melainkan juga dilihat dari terpenuhinya tujuan syar'i dari pemerintahan Indonesia dalam rangka menjaga kesejahteraan dan kemaslahatan umum warga negaranya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan serta analisis skripsi yang berjudul “Analisis Fiqih Siyasah Mengenai Negara Hukum Pancasila” dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Konsep Negara Hukum Pancasila merupakan konsep yang memiliki asas-asas atau prinsip-prinsip bernegara yakni adanya supremasi hukum adanya pemerintah berdasarkan hukum, adanya pemerintahan berdasarkan hukum, Demokrasi, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, kekuasaan hakim yang bebas tanpa intervensi, adanya sarana kontrol hukum bagi tindakan-tindakan pemerintah, hukum bertujuan untuk mensejahterakan dan keadilan sosial warga masyarakat, berdasarkan asas ketuhanan yang maha Esa
2. Kedudukan Negara Hukum Pancasila berdasarkan prinsip-prinsip bernegara dalam Fiqih Siyasah, maka konsep pemerintahan Indonesia adalah sah dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunah. Antara konsep Negara Hukum Pancasila dan konsep negara hukum menurut fiqih siyasah memiliki banyak persamaan dalam prinsip bernegaranya. Keabsahan ini bukan hanya dilihat dari sistem pemilihan dan mekanisme pelantikan presidennya saja melainkan juga dilihat dari terpenuhinya tujuan syar’I dari pemerintahan Indonesia dalam rangka menjaga kesejahteraan dan kemaslahatan umum warga negaranya.

B. Saran

Banyak dari masyarakat Indonesia yang sejatinya belum paham arti pancasila. Oleh sebab itu penulis dalam hal ini beranggapan bahwa perlu adanya kegiatan sosialisasi dengan tema konsep negara hukum pancasila. Kegiatan sosialisasi baik dalam lingkungan sekolah umum maupun sekolah khusus seperti sekolah yang pondok pesantren, sosialisasi ini juga harus diadakan dalam lingkungan masyarakat umum. Hal-hal tersebut

untuk menghindari kesalah pahaman penafsiran Pancasila sebagai idiologi negara, pada hal prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam demokrasi Islam seperti prinsip musyawarah, keadilan persamaan dan kebebasan secara konstitusional baik secara eksplisit maupun secara implisit sudah tercermin dalam UUD 1945 dan Pancasila.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman Dahlan. *Ushul Fiqih*. Jakarta:Amzah,2014.
- Abdul Khadir Muhammad. *Hukum dan Politik Hukum*. Citra Ditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abuddin Nata. *Metodelogi Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ahmed Vaezi. *Agama Politik Nalar Politik Islam*. Jakarta: Citra, 2006.
- Arief Subhan dkk. *Citra Perempuan dalam Islam Pandangan Orman Keagamaan*. Jakarta: PT SUN, 2003.
- A Zazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Bandung: Prena Media, 2003.
- Backy Krisnayuda. *Pancasila & Undang-Undang Realisis dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- CST Kansil. *Pancasila & Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Pradya Pramita,1999.
- Darji Darmodiharjo dkk. *Santiaji Pancasila cet. 10*. Surabaya:Usaha Nasional, 1991.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an & Terjemah 30 Juz*. Solo: Qomari Prima Publisher, 2007.
- Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Herdi Sahrasad, "Negara, Island dan Nasionalisme Sebuah Perspektif", *Al-Chaidar*, Vol.3 No.1 (April 2013).
- Herimanto dan Winarno. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar cetakan Keenam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Harjono. *Legitimasi Perubahan Konstitusi Kajian Terhadap UUD 1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- HA Muin Umar. *Ummah Komunitas Relegius, Sosial dan Politis Dalam Al-Quran*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press & Mitra Gama Widya, 1990.

- Mahmuda, "Konsep Negara Ideal/Utama (Al-Madinah Al-Fadilah) Menurut Al-Farabi" *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.2, No. 1 (September 2017).
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Pranadamedia, 2014.
- Muhammad Rusli. *Ushul Fiqih I*. Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2017.
- Mujar Ibnu Syarif. *Hak-Hak Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam*. Bandung: Angkasa Bandung, 2003.
- Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Priode Madinah dan Masa Kini* .Jakarta: Kencana, 2004.
- Moh Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi*. Jakarta:Rajawali Pers, 2010.
- Munawir Sjadzali. *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan pemikiran*. Jakarta: UI Press, 2011.
- Poewadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN . Jakarta:Balai Pustaka,1997.
- Slamet Sutrisno. *Filsafat Dan Ideologi Pancasila*. Yokyakarta: Andi Yokyakarta, 2006.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta:PT Adi Mahasatya,2007.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Cetakan ke III*. Bandung:Bina Aksara,1990.
- Susiadi AS. *Metode penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015.
- Syahrial Syarbani. *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amir. *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah,2009.
- Teguh Prasetyo & Arie Purnomosidi. *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*. Bandung: Nusa Media, 2014.

- Yopi Gunawan & Kristian. *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945
- Wahyu Widodo & Budi Anwari. *Pendidikan Pancasila Hakikat, Pengamalan & Nilai-Nilai Dalam Pancasila*. Yogyakarta: Andi, 2015.
- Zainudin Ali. *Sosialogi Hukum cet. Keempat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zakaria Syafe'I. *Negara Dalam Perspektif Islam Fiqih Siyasah*. Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012.
- Syahrial Syarbani. *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Gahalia Indonesia, 2002.
- Taufiq & Ahmad Azhar Basyir dkk. *Hukum Islam Dalam Tataatnan Masyarakat Indonesia* .Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1998.

